

5. PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA BLITAR TAHUN 2021-2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Memasuki dunia informasi global yang mengedepankan penggunaan aplikasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi, tak terkecuali dalam proses pelayanan kepada masyarakat, pemerintah dituntut untuk aktif mengadaptasi dan memfasilitasi proses akselerasi penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di segala sektor. Sehingga akan tercipta peningkatan efisiensi dan efektifitas di bidang pemerintahan sekaligus pelayanan kepada masyarakat. Peningkatan mutu penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi merupakan salah satu upaya pemerintah menciptakan transparansi dan akuntabilitas organisasi. Akuntabilitas organisasi yang diharapkan akan bermuara pada penyelenggaraan *good governance* ini dapat terlaksana dengan optimal melalui pemanfaatan *e-government*. Pemanfaatan *e government* secara optimal mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas pemerintah. Namun, penting untuk memastikan perlindungan data pribadi, keamanan siber, dan inklusi digital saat mengimplementasikan sistem ini.

Keterbukaan Informasi Publik yang merupakan kewajiban setiap Badan Publik menjadi bagian penting dalam reformasi birokrasi, karena masuk ke dalam semua area dari reformasi birokrasi, tentang tata cara menyampaikan kepada publik mengenai kinerja yang berkaitan dalam perumusan, koordinasi dan sinkronisasi, serta evaluasi kebijakan tersebut. Selain itu keterbukaan informasi publik juga diperlukan dalam penguatan implementasi pelayanan publik. Sebagai penyelenggara pelayanan publik terus mendorong masyarakat untuk secara terbuka mengakses informasi publik melalui berbagai kanal yg ada. Selain itu melalui keterbukaan informasi publik, masyarakat juga dapat memberikan masukan, saran, dan kritik kepada pemerintah agar pelayanan publik lebih baik.

Dalam implementasi revolusi industri 4.0 dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) seluruh perangkat mesin, sensor, dan sistem teknologi informasi berinteraksi melalui internet. Data dan informasi menjadi aset berharga yang dapat rentan terhadap serangan siber. Keamanan informasi berperan penting sebagai fondasi dalam menjaga keamanan dan keterhubungan seluruh sistem. Fondasi keamanan informasi perlu diperkuat, disinergikan, dan dioptimalkan agar tingkat ketahanan siber pemerintah semakin kuat dalam menghadapi ancaman di ruang siber. Oleh karena itu, diperlukan adanya strategi yang dapat memberikan kejelasan bahwa instansi Pemerintah tidak hanya melihat ancaman siber dalam lingkup sempit, namun juga dalam perspektif yang lebih luas demi mewujudkan Strategi Keamanan Siber Nasional (SKSN) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2023.

Di lingkungan pemerintahan, data dihasilkan dan digunakan oleh semua sektor penyelenggara bidang urusan. Dewasa ini, semakin banyak data yang dihasilkan suatu sektor yang dapat dimanfaatkan oleh sektor lain. Pemerintah telah menyadari betapa pentingnya

pengelolaan data yang terintegrasi. Dalam konteks data statistik, UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik telah mengatur tentang Sistem Statistik Nasional (SSN). Konsep SSN adalah pengelolaan data statistik secara terintegrasi dari mulai tingkat daerah sampai dengan tingkat nasional. Inisiatif Satu Data Indonesia lahir sebagai upaya untuk menyediakan data yang kredibel, akuntabel dan mutakhir guna mendukung terwujudnya pembangunan serta penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar menyusun rencana strategis untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/ atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Penyusunan rencana strategis ini dilaksanakan dengan berpedoman pada Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 2 ayat (2), yang mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah dan perencanaan tahunan yang selanjutnya diatur dalam Undang – Undang nomor 23 tahun 2014 pasal 272 (1), (2) dan (3) yang menyebutkan bahwa Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD.

Perencanaan sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam Rencana Strategis Perangkat daerah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.

Selanjutnya rencana strategis perangkat daerah dirumuskan ke dalam rencana kerja perangkat daerah dan digunakan sebagai bahan dalam penyusunan RKPD. Renstra juga digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota serta sebagai dasar pengusulan program/ kegiatan yang akan dibiayai APBD Propinsi dan APBN.

Dalam pelaksanaannya, Rencana Strategis (Renstra) Dinas komunikasi, Informasi dan Statistik Kota Blitar tahun 2021 – 2026 perlu dilakukan perubahan dikarenakan hal – hal berikut :

1. Terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang berdampak pada pemutakhiran seluruh kode sub kegiatan.
2. Tindak lanjut evaluasi Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Kota Blitar Tahun 2023 terkait integrasi pohon kinerja ke dokumen perencanaan. Penyesuaian dilakukan pada level tujuan dan sasaran Perangkat Daerah nomor 050/775/410.201.3/2023.

2.1. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
- b. Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 47, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- d. Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 104, (tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- f. Undang-Undang nomor 17 tahun 2007 tentang Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- g. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- h. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lemaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 - m. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6402);
 - n. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 - o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
 - p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 - q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461);
 - r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 - s. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1327);
 - t. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 - u. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 - v. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1114);
 - w. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi , Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 - x. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang

- Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
- y. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 - z. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
 - aa. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Nomor 900.1.14.3/1483/SJ tentang Hasil Pemetaan, Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait Penggunaan DBHCHT TA 2023, DBHDR TA 2023 dan DAK TA 2023;
 - bb. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
 - cc. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 05 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur tahun 2011-2031;
 - dd. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Nomor 12 Daerah Kota Blitar Tahun 2005-2025;
 - ee. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Blitar Tahun 2011-2030; dan
 - ff. Peraturan daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2010 Nomor 2);
 - gg. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 7);
 - hh. Peraturan Walikota Blitar Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Tata Kelola Informasi Dan Komunikasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar
 - ii. Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar;
 - jj. Peraturan Walikota Blitar Nomor 55 Tahun 2020 Tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kota Blitar;
 - kk. Peraturan Walikota Blitar Nomor 78 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sertifikat Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar;
 - ll. Peraturan Walikota Blitar Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112;
 - mm. Peraturan Walikota Blitar Nomor 25 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar;
 - nn. Peraturan Walikota Blitar Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026;

- oo. Peraturan Walikota Blitar Nomor 88 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
- pp. Peraturan Walikota Blitar Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- qq. Peraturan Walikota Blitar Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi Publik;
- rr. Peraturan Walikota Blitar Nomor 41 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2020

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Tahun 2021 – 2026 ini dimaksudkan untuk menyediakan arah kebijakan pembangunan di bidang Komunikasi, Informatika, Statistik sektoral dan Persandian Keamanan Informasi selama lima tahun, yang disusun berpedoman pada perubahan RPJMD Kota Blitar Tahun 2021-2026;

1.3.2. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi kinerja pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik selama 5 (lima) tahun terakhir pada periode pembangunan yang lalu;
- b. Mengidentifikasikan permasalahan dan isu strategis Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik selama 5 (lima) tahun mendatang;
- c. Menjabarkan visi dan misi RPJMD Tahun 2021-2026 ke dalam tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan;
- d. Menetapkan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik yang disertai pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun mendatang;
- e. Menetapkan kinerja penyelenggaraan bidang urusan yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik selama 5 (lima) mendatang;
- f. Menyediakan panduan penyusunan rencana kerja (renja) perangkat daerah dan RKA SKPD; dan
- g. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun.

2.2. Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik 2021 – 2026 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I

PENDAHULUAN

Pada bab ini mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra perangkat daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

BAB II	GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK Pada bab ini menguraikan tentang struktur organisasi beserta tugas pokok dan fungsinya, sumber daya organisasi, capaian kinerja pelayanan dinas, tantangan dan peluang serta pengembangan pelayanan dinas yang bisa dicapai melalui Renstra perangkat dinas.
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK Pada bab ini memuat Identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Telaahan Renstra Kementerian dan Lembaga Terkait, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kota Blitar dan Penentuan Isi-isu strategis.
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN Pada bab ini memuat pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah dinas
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN Pada bab ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik dalam lima tahun mendatang.
BAB V	RENCANA PROGRAM , KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN Pada bab ini rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK Pada bab ini memuat indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.
BAB VIII	PENUTUP Berisi kesimpulan secara singkat dan representatif dari uraian Bab – Bab sebelumnya serta harapan yang diiinginkan menuju peningkatan pelayanan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik serta menjadi pedoman bagi pembangunan sampai dengan Tahun 2021.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.1.1. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik ditetapkan melalui Peraturan Walikota Blitar Nomor 66 tahun 2016 sebagaimana telah diubah (dicabut) melalui Peraturan Walikota Blitar Nomor 25 Tahun

2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik.

Kedudukan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang komunikasi, informatika, bidang statistik dan bidang persandian yang menjadi kewenangan daerah, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah

Adapun tugas pokok dan fungsi pada Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik adalah sebagai berikut :

1. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik dan bidang Persandian yang menjadi kewenangan daerah serta tugas pembantuan.
2. Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik melaksanakan tugas pokok dan fungsi :
 - a. perumusan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi informasi dan komunikasi publik;
 - b. perumusan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi aplikasi informatika;
 - c. perumusan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi statistik sektoral di lingkup daerah kota;
 - d. perumusan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi;
 - e. pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;
 - f. pelaksanaan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD);
 - g. penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor;
 - h. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
 - i. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
 - j. pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
 - k. pengelolaan pengaduan masyarakat;
 - l. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik secara berkala melalui sub domain website pemerintah daerah;
 - m. pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik; dan
 - n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas Kepala Dinas dibantu oleh sekretariat dan bidang - bidang, dan mempunyai tugas menyelenggarakan, memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Walikota.

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi di lingkungan dinas meliputi perencanaan, mengkoordinasikan tugas pada bidang-bidang, pengelolaan administrasi umum, rumah tangga, administrasi kepegawaian, kearsipan dan administrasi keuangan;

Untuk menjalankan tugas tersebut Sekretariat menjalankan fungsi:

- a. pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Kepala Dinas;
- b. pengkoordinasian dan penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja unit kerja secara terpadu;
- c. pengkoordinasian dan fasilitasi kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi bidang-bidang di lingkungan Dinas;
- d. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan penyusunan program/ kegiatan Sekretariat;
- e. pengkoordinasian dan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA);
- f. pengkoordinasian penyusunan dan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
- g. fasilitasi penyusunan Penetapan Kinerja (PK) dan Perubahan Penetapan Kinerja;
- h. pengkoordinasian dan fasilitasi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD);
- i. pengkoordinasian internal dan eksternal serta pembinaan penyelenggaraan organisasi dan tatalaksana organisasi Dinas;
- j. pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan urusan rumah tangga dan tata usaha Dinas;
- k. pengkoordinasian dan fasilitasi administrasi perjalanan dinas, tugas-tugas keprotokolan dan kehumasan;
- l. pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan administrasi perlengkapan, sarana prasarana, keamanan kantor dan penyelenggaraan rapat-rapat dinas;
- m. fasilitasi pelaksanaan pembelian/ pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- n. fasilitasi pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- o. fasilitasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
- p. pengkoordinasian pengusulan penataan organisasi, tata laksana dan produk hukum lainnya;
- q. fasilitasi pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan;
- r. pengkoordinasian penyusunan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- s. fasilitasi dan koordinasi penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) masing-masing bidang dan Standar Pelayanan Publik (SPP);
- t. fasilitasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- u. fasilitasi pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan

- pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
- v. fasilitasi penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota (LKPJ), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP);
 - w. pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang komunikasi dan Informatika, bidang statistik serta bidang persandian;
 - x. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan bidang komunikasi dan Informatika, bidang statistik serta bidang persandian secara berkala melalui sub domain website Pemerintah Daerah;
 - y. penyelenggaraan, pembinaan dan pengendalian pelayanan administrasi umum, kepegawaian, kearsipan dan penatausahaan keuangan;
 - z. penyelenggaraan dan pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan informasi dan publikasi;
 - aa. pengkoordinasian penyusunan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja Dinas;
 - bb. pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Selanjutnya Sekretaris dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dibantu oleh 2 Sub bagian yaitu Sub Bagian Program dan Kepegawaian dan Sub Bagian Umum dan Keuangan.

Adapun tugas Sub Bagian Program dan Kepegawaian yaitu:

- a. mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan kebijakan operasional di bidang program dan kepegawaian ;
- b. melaksanakan pengkoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan masing-masing unit di lingkungan Dinas;
- c. menyusun, melaksanakan rencana program dan/atau kegiatan;
- d. melakukan kegiatan pelayanan kegiatan program dan kepegawaian dilingkungan Dinas;
- e. melaksanakan penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Rencana Kinerja Tahunan Dinas;
- f. melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Dinas ;
- g. melaksanakan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas dan Dokumen Perubahannya;
- h. melaksanakan penyusunan Penetapan Kinerja (PK) dan perubahan Penetapan Kinerja;
- i. melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- j. melaksanakan fasilitasi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan laporan kinerja instansi pemerintah sesuai dengan peraturan perundangan;
- k. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas, pendataan hasil kerja serta menyusun pelaporan kinerja administrasi program dan kepegawaian;

- l. menyusun, mengelola dan memelihara data administrasi kepegawaian dan tugas-tugas kehumasan;
- m. melaksanakan pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik dan bidang persandian;
- n. menyusun dan melaksanakan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- o. melaksanakan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan.

Sedangkan Sub Bagian Umum dan Keuangan melaksanakan tugas:

- a. menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan kebijakan operasional di bidang administrasi umum, keuangan dan penatausahaan barang;
- b. mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan administrasi umum, keuangan dan penatausahaan barang;
- c. menyusun dan melaksanakan rencana program dan/atau kegiatan Sub Bagian Umum dan Keuangan;
- d. menyelenggarakan kegiatan pelayanan administrasi umum, penatausahaan barang dan administrasi pengelolaan keuangan serta pertanggungjawaban keuangan;
- e. melakukan penatausahaan keuangan Dinas dan pengelolaan urusan gaji pegawai Dinas, serta verifikasi surat pertanggungjawaban (SPJ);
- f. penyiapan usulan pejabat pengelola keuangan di lingkup Dinas;
- g. melaksanakan dan mengelola surat – menyurat dan tata kearsipan;
- h. melaksanakan dan mengelola urusan rumah tangga, protokoler, upacara dan rapat dinas;
- i. pengelolaan administrasi perjalanan dinas;
- j. melaksanakan urusan keamanan, kebersihan dan tata laksana;
- k. melaksanakan dan pengendalian tata usaha pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, perawatan barang inventaris sesuai ketentuan yang berlaku;
- l. melaksanakan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- m. melaksanakan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
- n. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas, pendataan hasil kerja serta menyusun pelaporan kinerja administrasi umum, keuangan dan penatausahaan barang;
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Selain Sekretaris, tugas Kepala Dinas dibantu oleh bidang yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Adapun bidang yang ada di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik adalah sebagai berikut :

1) Bidang Informasi Dan Komunikasi Publik

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis dan menyelenggarakan program dan/atau kegiatan di Bidang Informasi dan Komunikasi Publik.

Untuk menjalankan tugas Bidang Informasi dan Komunikasi Publik menjalankan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Informasi dan Komunikasi Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Kepala Dinas;
- b. penyusunan program/ kegiatan di bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
- c. pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah;
- d. pelaksanaan monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi Pemerintah Daerah;
- e. pengelolaan konten dan perencanaan Media Komunikasi Publik;
- f. pengelolaan Media Komunikasi Publik;
- g. pelayanan Informasi Publik;
- h. pelayanan hubungan media;
- i. penguatan kemitraan dengan pemangku kepentingan;
- j. pengelolaan manajemen komunikasi krisis;
- k. penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik;
- l. penyelenggaraan hubungan masyarakat, media dan kemitraan komunitas; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai

2) Bidang Aplikasi Informatika

Bidang Aplikasi Informatika dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Aplikasi Informatika yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Bidang Aplikasi Informatika mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis dan menyelenggarakan program dan/atau kegiatan di Bidang Aplikasi Informatika;

Untuk menjalankan tugas Bidang Aplikasi Informatika menjalankan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Aplikasi Informatika berdasarkan peraturan perundang – undangan dan kebijakan Kepala Dinas;
- b. penyusunan dan pelaksanaan program / kegiatan di bidang aplikasi informatika;
- c. pelaksanaan pendaftaran nama domain pemerintah daerah;
- d. penatalaksanaan dan pengawasan nama domain dan sub domain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- e. penyelenggaraan sistem jaringan intra pemerintah daerah;
- f. penatalaksanaan dan pengawasan e-govemment dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- g. pelaksanaan sinkronisasi pengelolaan rencana induk dan anggaran pemerintahan berbasis elektronik;
- h. pengelolaan pusat data pemerintahan daerah;
- i. penyelenggaraan sistem komunikasi intra pemerintah daerah;
- j. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi sistem keamanan informasi;
- k. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi data dan informasi elektronik;

- l. pengembangan aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik;
- m. penyelenggaraan sistem penghubung layanan pemerintah;
- n. pengembangan dan pengelolaan ekosistem kota cerdas;
- o. pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah daerah;
- p. pemantauan, evaluasi dan sinkronisasi rencana induk SPBE;
- q. pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO); dan
- r. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

3) Bidang Statistik Dan Persandian

Bidang Statistik dan Persandian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Statistik dan Persandian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;

Bidang Statistik dan Persandian mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis dan menyelenggarakan program dan/atau kegiatan di Bidang Statistik dan Persandian;

Untuk menjalankan tugas Bidang Statistik dan Persandian menjalankan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Statistik dan Persandian berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Kepala Dinas;
- b. penyusunan dan pelaksanaan program/kegiatan di bidang statistik dan persandian;
- c. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral;
- d. peningkatan kapasitas SDM pemerintah daerah dalam peningkatan mutu statistik daerah yang terintegrasi;
- e. pelaksanaan pembangunan metadata statistik sektoral;
- f. peningkatan kapasitas kelembagaan statistik sektoral;
- g. pengembangan infrastruktur statistik sektoral;
- h. penyelenggaraan otorisasi statistik sektoral di daerah;
- i. penetapan kebijakan tata kelola keamanan informasi dan jaring komunikasi sandi pemerintah daerah;
- j. pelaksanaan analisis kebutuhan dan pengelolaan sumber daya keamanan informasi pemerintah daerah;
- k. pelaksanaan pengamanan informasi pemerintahan daerah berbasis elektronik dan non elektronik; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

4) Kelompok Jabatan Fungsional

- a. Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggung secara langsung kepada Kepala Dinas;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- c. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari beberapa jabatan fungsional dan terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

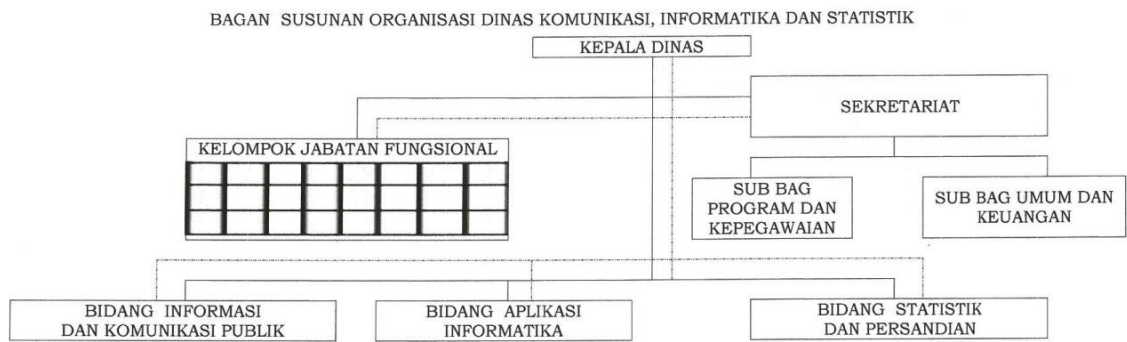
- d. Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Walikota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundangan- undangan.
- e. Jabatan fungsional diduduki oleh pejabat fungsional sesuai peraturan perundangan-undangan.

2.1.2. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar terdiri dari:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang membawahi:
 - 1) Sub Bagian Program dan Kepegawaian; dan
 - 2) Sub Bagian Umum dan Keuangan;
- c. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
- d. Bidang Aplikasi Informatika;
- e. Bidang Statistik dan Persandian; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Susunan Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik sebagai berikut :



Gambar 2.1

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik berkedudukan di Jalan. Dr. Moh. Hatta No 05 Kota Blitar, Telepon/ Faksimile (0342)807805, alamat situs web : <http://diskominfotik.blitarkota.go.id> serta e-mail : diskominfotik@blitarkota.go.id.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik didukung oleh orang karyawan/ karyawan yang terdiri dari 30 orang PNS, 1 orang PTT, 34 orang Tenaga Harian Lepas Per 1 Januari 2023

Data jumlah pegawai Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik berdasarkan eselonisasi, golongan dan tingkat pendidikan adalah sebagaimana gambar 2.2

Tabel 2.2

Jumlah Pegawai Dinas Komunikasi , Informatika dan Statistik Menurut Pangkat dan Golongan , Tingkat Pendidikan, Pejabat Struktural/Fungsional

No	Pangkat/Golongan	Jenis Kelamin (Orang)		
		Laki – laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4	5

1.	Pembina Tk. I (IVb)	1	-	1
2.	Pembina (IV a)		1	1
3.	Penata Tk I (IIIId)	1	1	2
4.	Penata (III/c)	3	4	7
5.	Penata Muda Tk I (IIIb)		1	1
6	Penata Muda (IIIa)	4	5	9
7	Pengatur Tk I (IIId)	2	0	2
8	Pengatur (IIc)	2	3	5
9	Pengatur Muda Tk I (IIb)	1	-	1
10	Pengatur Muda (II a)	1		1
11	PTT	-	1	1
	Jumlah	15	16	31

No	Tingkat Pendidikan	Struktural	Fungsional	JFU	Jumlah
1	Pasca Sarjana (S2)	3	1		4
2	Sarjana (S1)	3	8	4	15
3	Diploma		4		4
4	SLTA	1		5	6
5	SLTP			1	1
6	SD	-	-		-
	Jumlah	7	13	10	30

Dari 30 (Tiga Puluh) personil tersebut , terbagi dalam struktur organisasi Dinas Komunikasi , Informatika dan Statistik Kota Blitar sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris membawahi :
 - 1) Sub bagian Program dan Kepegawaian
 - 2) Sub Bagian Umum dan Keuangan
- c. Bidang Informasi Komunikasi Publik
- d. Bidang Aplikasi Informatika
- e. Bidang Statistik dan Persandian
- f. Kelompok jabatan fungsional :

Pranata Humas Ahli Muda	Pranata Komputer Ahli Pertama	Pranata Komputer Pelaksanan/Terampil
Pranata Komputer Ahli Muda	Sandiman Ahli Pertama	Pranata Humas Pelaksanan/Terampil
Sandiman Ahli Muda	Stastisi Ahli Pertama	
	Pranata Humas Ahli Pertama	

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kota Blitar

2.3.1. Pencapaian Kinerja Pelayanan

Pengukuran terhadap kinerja pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik diukur berdasarkan tingkat pencapaian pelayanan dinas dari beberapa sudut pandang penilaian atau standar pelayanan. Adapun standar penilaian yang dipakai adalah sebagai berikut :

- a. Tingkat kinerja pelayanan dari sudut pencapaian terhadap indikator kinerja kunci (IKK); dan
- b. Tingkat kinerja pelayanan dari sudut pencapaian terhadap indikator utama (IKU).

Dari tingkat pencapaian kinerja pelayanan yang dicapai, dapat dipergunakan sebagai bahan acuan penetapan program kegiatan di masa yang akan datang untuk meningkatkan pencapaian terhadap target-target baik indikator kinerja kunci dan indikator kinerja utama OPD, khususnya bagi pencapaian yang belum mencapai target.

Adapun perhitungan terhadap capaian target Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik dimulai pada tahun 2014 dengan kelembagaan lama pada Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kota Blitar. Selanjutnya capaian target ini mengalami penyesuaian ketika terjadi perubahan kelembagaan lagi di tahun 2017 sesuai organisasi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Organisasi Perangkat Kota Blitar dan Peraturan Walikota Blitar Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik.

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar Tahun 2016- 2020

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM	Target IKK	Target Indikator or Lainnya	Target Renstra PD Tahun Ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Indikator Tujuan (IKU)																		
	Persentase penerapan layanan pemerintahan dan layanan publik berbasis TIK yang terintegrasi		-		-	27%	31%	42%	36%	-	44,44 %	46,80 %	51,06 %	76,69 %		164,59 %	150,96 %	95,32%	221,36 %
2	Indikator sasaran (IKU)		-																
	Persentase ketersediaan layanan aplikasi e Gov pada OPD		-			26,67 %	31,11 %	35,56 %	40%		45,95 %	51,35 %	59,45 %	83,78 %		172,29 %	165,06 %	167,18 %	209%
	Persentase peningkatan keterbukaan informasi dan komunikasi publik		-			94,05 %	95%	96%	97%	-	99,84 %	98,92 %	99,67 %	100%	-	106,16 %	104,13 %	103%	103%

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM	Target IKK	Target Indikator or Lainnya	Target Renstra PD Tahun Ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Persentase data statistik yang terlayani melalui e governance					70%	75%	80%	80%	-	72,22 %	83,33 %	89%	90%	-	103,17 %	96,29%	111%	112,5%
	Persentase Informasi pemerintah yang terfasilitasi keamanan informasi					100%	100%	100%	100 %	-	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	100%

2.3.2. Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan

Pengukuran kinerja anggaran dilakukan terhadap tingkat pencapaian/ realisasi anggaran yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) beserta tingkat pertumbuhan anggaran dan realisasinya. Terkait dengan kelembagaan pada Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Tahun 2022 Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Blitar maka yang akan disajikan pada pengukuran kinerja anggaran ini adalah anggaran sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada perangkat daerah .

Berikut disampaikan besaran anggaran, realisasi anggaran, tingkat capaian realisasi dan tingkat pertumbuhan atas anggaran dan realisasi anggaran sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 2.4

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar Tahun 2016-2020

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi	Anggaran pada Tahun ke					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	NA		894.524.900	2.193.257.300	2.916.671.100	NA		871.505.224	2.071.890.984	2.833.363.383	NA		97,43	94,47	97,14	2.001.484.433	1.925.586.530	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN E-GOVERNANCE	NA		14.247.891.000	19.686.657.892	11.201.331.894	NA		3.780.507.222	14.181.518.450	8.393.714.203,30	NA		26,53	72,04	74,93	2.001.484.433	8.785.246.625	
3	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA, INFORMASI DAN STATISTIK DAERAH	NA		520.932.000	533.540.000	452.074.500	NA		513.949.223,00	525.395.000	450.460.300	NA		98,66	98,47	99,64	502.182.167	496.601.508	
4	PROGRAM PENGELOLAAN KEAMANAN INFORMASI MILIK PEMERINTAH ATAU NEGARA	NA		121.608.700,00	299.158.200	200.530.000	NA		113.668.926,00	267.897.722	200.530.000	NA		93,47	89,54	99,60	207.098.967	277.342.316	

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya merupakan lembaga teknis daerah yang cukup strategis dalam menentukan kebijakan program pengembangan urusan pemerintahan di bidang komunikasi, informatika, bidang statistik dan bidang persandian di daerah, agar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dapat berjalan sesuai dengan ketentuan, maka diperlukan faktor-faktor pendukung yang merupakan kekuatan, ancaman, peluang dan kelemahan, baik faktor-faktor pendukung internal maupun faktor eksternal.

Faktor internal dan eksternal dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Faktor Internal, terdiri dari :

a. Kekuatan

- 1) Adanya dukungan Pemerintah Kota Blitar di bidang komunikasi, informatika, bidang statistik dan bidang persandian melalui Peraturan Walikota Blitar No 25 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik ;
- 2) Adanya Peraturan Walikota Blitar Nomor 41 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar
- 3) Adanya Peraturan Walikota Blitar Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi Publik
- 4) Adanya Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kota Blitar;
- 5) Adanya Peraturan Walikota Blitar Nomor 88 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik,
- 6) Adanya Peraturan Walikota Blitar Nomor 55 Tahun 2020 Tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kota Blitar
- 7) Adanya Peraturan Walikota Blitar Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
- 8) Sudah membangun fiber optic untuk mensupport pengembangan IT di Kota Blitar.
- 9) Adanya Aplikasi yang memudahkan pemohon informasi untuk mengakses informasi publik secara online yaitu PPID. Aplikasi DIOPEN yang mengintegrasikan daftar informasi publik, PPID Utama dan PPID Pelaksana secara online.
- 10) Adanya peraturan dan kebijakan yang menaungi implementasi persandian dan keamanan informasi. Adanya SK Tim CSIRT untuk pengelolaan pengaduan insiden siber
- 11) Adanya aplikasi Adata dan Open Data sebagai aplikasi penyedia data statistik sektoral
- 12) Tersedianya Sistem Aplikasi Online dalam upaya peningkatan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik, yang terintegrasi seperti : Aplikasi Bidang Perencanaan, Aplikasi Bidang Penganggaran, Aplikasi Bidang Layanan Keuangan, Pengadaan Barang dan Jasa, Kepegawaian, Kerasipan, pengelolaan Barang Milik Daerah, Pengawasan Internal Pemerintah dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi, Layanan Kinerja Pegawai , Layanan Pengaduan Publik, Layanan data Terbuka, Layanan JDIH, dan berbagai macam aplikasi layanan publik. (diambilkan dari indikator pada SPBE)
- 13) Tersedianya Dokumen Arsitektur SPBE 2022-2025 sebagai acuan dalam penyelenggaraan SPBE di Pemerintah Kota Blitar.
- 14) Tersedianya Sumber Daya Manusia dengan kualifikasi pendidikan lulusan S1 dan S2 dan rata - rata menguasai komputer.
- 15) Tersedianya sarana dan prasarana dalam menunjang perencanaan dan pengembangan di bidang Informasi

Komunikasi Publik, Bidang Aptika, dan Bidang Statistik dan Persandian.

b. Kelemahan

- 1) Sebagian staf masih belum memahami tupoksi di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik .
- 2) Belum optimalnya kuantitas dan kualitas Data Sektoral untuk mendukung Satu Data Indonesia
- 3) Adanya sejumlah Sistem elektronik yang dikelola Dinas Kominfotik belum terintegrasi
- 4) Pelaksanaan diseminasi informasi publik belum berjalan secara optimal;.
- 5) Kurangnya bimbingan teknis, sosialisasi di bidang komunikasi dan informatika terhadap aparatur pemerintah;
- 6) Kurang kesadaran dari aparatur terhadap arti penting data dan informasi khususnya dalam pengamanan informasi.

2. Faktor Eksternal, adalah;

a. Peluang

- 1) Adanya Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
- 2) Adanya Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
- 3) Adanya Undang Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi
- 4) Adanya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah khususnya dalam Pasal 274 yang berbunyi Perencanaan pembangunan Daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam sistem informasi pembangunan Daerah
- 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah pada Pasal 120 ayat (1) berbunyi dalam rangka meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat, Perangkat Daerah secara bertahap menerapkan sistem informasi yang terintegrasi antar Kabupaten/ Kota, Provinsi, dan Pemerintah Pusat dengan menggunakan infrastruktur dan aplikasi secara berbagi pakai;
- 6) Peningkatan perkembangan Teknologi Informasi baik dari sisi Hardware maupun software dapat dipergunakan untuk meningkatkan kualitas aplikasi sistem informasi serta layanan akses internet di masyarakat;
- 7) Semakin meningkatnya kualitas SDM yang mempunyai pengetahuan di bidang IT;
- 8) Semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya informasi publik.
- 9) Peraturan Walikota Blitar No. 78 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sertifikat Elektronik Dilingkungan Pemkot Blitar
- 10) Peraturan Walikota Blitar Nomor 41 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar
- 11) Perwali Blitar No. 10 tahun 2016 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Mahardhika FM Kota Blitar .
- 12) Perwali Blitar No. 16 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112
- 13) Peraturan Badan Siber Dan Sandi Negara No. 10 Tahun 2019 Pelaksanaan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Di Pemda .
- 14) Peraturan Republik Indonesia No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia .
- 15) Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika

- 16) Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No. 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektorial oleh Pemerintah Daerah .

b. Tantangan

- 1) Banyaknya peraturan baru yang harus disesuaikan dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat;
- 2) Semakin meningkatnya frekuensi gangguan dari hacker dalam mencoba melakukan gangguan terhadap sistem informasi milik Pemerintah;
- 3) Penyediaan akses internet yang semakin mudah dan biaya terjangkau;
- 4) Masyarakat yang semakin kritis terhadap proses dan hasil-hasil pembangunan yang telah dilakukan sebagai bagian dari keterbukaan informasi publik;
- 5) Kekhawatiran ketersediaan anggaran yang kurang memadai baik penerimaan dari DAU dan PAD yang cenderung semakin menurun.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar mengalami berbagai kendala yang disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal. Faktor internal adalah hal-hal yang berkaitan dengan organisasi atau berasal dari dalam OPD, sedangkan faktor eksternal adalah hal-hal yang berkaitan dengan dinamika nasional, provinsi dan lembaga atau instansi di luar organisasi yang di masa mendatang diperkirakan akan menimbulkan permasalahan-permasalahan baru.

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan – permasalahan pelayanan perangkat daerah beserta factor-faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil pengisian Tabel berikut :

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan sasaran
Pembangunan Daerah
Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar masalah
1	2	3	4
	Urusan Komunikasi Informatika		
1.	Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik belum optimal	Intergrasi aplikasi yang telah dilakukan kota Blitar tidak berjalan setelah terbitnya kebijakan penggunaan Aplikasi Pemerintahan (SIPD) yang dikembangkan pusat	Pemahaman OPD terekait aplikasi generic dan aplikasi khusus
			Belum tersediannya fitur pertukaran data maupun database replikasi untuk aplikasi pemerintahan maupun pelayanan publik milik pusat
			Masih adanya OPD yang mengembangkan aplikasi sejenis yang telah dibuat oleh OPD/ instansi lain
			Belum terwujudnya satu data melalui pengelolaan satu database terpadu untuk seluruh aplikasi
2.	Belum optimalnya keterbukaan informasi publik	Belum optimalnnya peran PPID	PPID Pelaksana belum memahami tentang DIP (Daftar Informasi Publik) yang bersifat terbuka dan Informasi yang dikecualikan
	Urusan Statistik		
3	Belum optimalnya pemanfaatan data statistik sektoral	Pelaporan data Statistik OPD belum terpenuhi	Kurangnya kesadaran produsen data OPD

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar masalah
1	2	3	4
			akan pentingnya data statistik sektoral
		Pengelolaan data statistik sektoral belum optimal	Belum optimalnya system informasi yang digunakan dalam pengelolaan data statistik
	Urusan Persandian		
4	Potensi terganggunya kerahasiaan (confidentiality), keutuhan (integrity), ketersediaan (availability) keaslian (authenticity) dan kenirsangkalan (non repudiation) informasi dan dokumen pemerintah di lingkungan Pemkot Blitar	Belum optimalnya pengelolaan keamanan informasi	Terbatasnya sumber daya untuk pengelolaan keamanan informasi

Tabel 3.2
Identifikasi Isu Strategis terkait Dinamika Nasional, Provinsi dan Kota Blitar

No	Isu Strategis			
	Nasional	Provinsi Jawa Timur	Kota Blitar	Dinas Kominfo dan Statistik
1	Menuju era digitalisasi <i>broadband</i> dari sistem analog	Implementasi <i>e-Government</i> di Jawa Timur belum optimal	Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik belum optimal	Terwujudnya pelayanan publik berbasis Teknologi Informasi yang terintegrasi
2	Keterbukaan informasi	Tuntutan Publik akan Keterbukaan Informasi dan Transparansi	Belum optimalnya keterbukaan informasi publik	Optimalisasi peranan PPID, pengelolaan pengaduan dan Peningkatan fungsi KIM
3	Keamanan Informasi	Lemahnya pengamanan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	Potensi ancaman siber terhadap sistem elektronik pemerintah	Peningkatan kesadaran terhadap keamanan sistem elektronik
4	Satu Data	Belum Optimalnya penyampaian data dari produsen data karena Belum adanya juknis pengumpulan data, Belum adanya standar pengisian bagi produsen data, dan belum adanya <i>tools</i> untuk penyampaian data <i>via web</i> .	Belum optimalnya pemanfaatan data statistik sektoral	Peningkatan kualitas pemanfaatan data statistik sektoral

Berdasarkan hasil identifikasi Isu strategis terkait Dinamika Nasional, Provinsi dan Kota Blitar perlu diperhatikan beberapa hal pada Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik, yaitu :

1. Dalam penyelenggaraan program/ kegiatan, hendaknya berpegangan pada program, karakter masyarakat serta keselarasan dengan program/ kegiatan pada PD lain sehingga dapat mendukung pelaksanaan visi misi Pemerintah Kota Blitar;
2. Dalam penyelenggaraan program/ kegiatan pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik harus selaras dengan kebijakan nasional, Provinsi Jawa Timur serta Pemerintah Kota Blitar sehingga konektivitas program dari pusat sampai tingkat PD dapat berjalan optimal.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Dalam penyusunan rencana program kegiatan, Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik tidak terlepas dari Visi Misi Kota Blitar yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Kota Blitar harus menjadi pedoman dalam pembuatan program/ kegiatan pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar.

Adapun Visi Kota Blitar tahun 2021 – 2026 adalah :

“Terwujudnya KOTA BLITAR KEREN UNGGUL, MAKMUR DAN BERMARTABAT”

Visi ini merupakan dasar dari semua pembangunan di Kota Blitar, dan juga menjadi target capaian yang menjadi cita-cita serta impian yang akan

diwujudkan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah terpilih dalam 5 (lima) tahun ke depan.

Sebagai upaya mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 5 misi yaitu:

1. Mewujudkan Tata Kehidupan yang Religius, Nasionalis, Setara Gender dan Berkepribadian dalam Kebudayaan ;
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Keren , Berdaya Saing , Sehat Jasmani – Rohani , Cerdas dan Berkarakter ;
3. Mewujudkan Beredikari secara ekonomi yang Berorientasi pada Ekonomi Kreatif , Pariwisata dan perdagangan Berbasis Digital
4. Mewujudkan Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkeadilan ;
5. Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi ;

Adapun misi yang diamanatkan pada Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik adalah misi ke-5 yaitu “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih Berbasis Teknologi Informasi ”.

Mendukung pelaksanaan misi ke-5 tersebut serta sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, maka ditetapkan tujuan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar adalah “Meningkatnya Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik”. Tujuan ini kemudian dijabarkan ke dalam sasaran Rencana Strategis (RENSTRA), yaitu :

1. Meningkatkan layanan SPBE melalui kebijakan dan tata kelola TIK
2. Meningkatkan Sistem Keterbukaan Informasi Publik
3. Meningkatkan Pemanfaatan Data Statistik Daerah.
4. Meningkatkan Keamanan Informasi

Berpedoman pada visi, misi, RPJMD 2021 – 2026 dan telah lebih lanjut dijabarkan dalam tujuan dan sasaran rencana strategis, maka sesuai tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program-program yang berkontribusi dalam menunjang keberhasilan mewujudkan target capaian program prioritas utama.

Dalam mencapai keberhasilan program/ kegiatan tidak terlepas dari faktor penghambat dan pendorong. Faktor-faktor tersebut diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 3.3
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan OPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota

V I S I				
Terwujudnya KOTA BLITAR KEREN UNGGUL MAKMUR DAN BERMANFAAT				
	Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi	Infrastruktur TIK yang belum memadai serta Sistem Informasi yang belum terintegrasi	SDM yang kualitas dan kuantitasnya belum memadai Ego sektoral pengembangan integrasi sistem informasi dalam satu sistem/ aplikasi	▪ Kebijakan arsitektur SPBE ▪ Ketersediaan jaringan infrastruktur <i>broadband</i>

3.3 Telaahan Renstra Kementerian/ Lembaga dan Renstra Pemerintah Provinsi Jawa Timur

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian

Telaahan terhadap Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika dimaksudkan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas antara Renstra Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik dengan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika

sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan serta tugas dan fungsinya masing-masing.

Adapun Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika memuat Visi dan Misi sebagai berikut :

VISI :

“Indonesia Maju yang berdaulat, Mandiri dan berkepribadian berlandaskan Gotong Royong“

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut melalui 7 misi pembangunan nasional yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia ;
2. Struktur ekonomi yang produktif , mandiri , dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan ;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan ;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa ;
6. Penegakan system hokum yang bebas korupsi ,bermartabat dan terpercaya ;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintah yang bersih , efektif , dan terpercaya ;
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan ;

Visi dan misi dari Kementerian Komunikasi Dan Informatika dapat dijadikan acuan atau gambaran dalam pencapaian program di daerah. Hal ini mengacu pada penetapan visi dan misi kementerian yang telah didasarkan pada kajian dengan mempertimbangkan karakteristik dan keragaman masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari perkotaan sampai pedesaan serta persebaran sumber daya alam maupun manusia.

3.3.2 Telaahan Renstra Provinsi

Selaras dengan visi dan misi dari Kementerian Komunikasi Dan Informatika serta visi dan misi Pemerintah Provinsi Jawa Timur yaitu :

V I S I :

"Terwujudnya Penyebarluasan Informasi dan Pelayanan Publik melalui TIK di Jawa Timur"

M I S I :

1. Meningkatkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan;
2. Meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan berdaya saing, berbasis agrobis/ agroindustri dan industrialisasi;
3. Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan dan penataan ruang;
4. Meningkatkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik;
5. Meningkatkan kualitas kesalehan sosial dan harmonisasi sosial

3.3.3 Keterkaitan Renstra Kementerian, Provinsi, dan Pemerintah Daerah

Selaras dengan visi dan misi baik di Kementerian Komunikasi Dan Informatika maupun Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Timur, maka diperlukan sinergitas serta penyesuaian di tingkat Kota Blitar khususnya pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik. Adapun kesesuaian dan keselarasan visi misi tersebut dapat diuraikan lebih lanjut sebagai berikut :

Tabel 3.4

Keterkaitan Rencana Strategis Kementerian, Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kota Blitar Dan Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kota Blitar

No	Rencana Stategis			
	Nasional	Provinsi Jawa Timur	Kota Blitar	Dinas Kominfo dan Statistik
1	Menuju era digitalisasi broadband dari sistem analog	Implementasi <i>e-Government</i> di Jawa Timur belum optimal	Pengelolaan kearsipan dalam bentuk eGoverment	Terwujudnya pelayanan publik berbasis Teknologi Informasi
2	Keterbuka an informasi	Tuntutan Publik akan Keterbukaan	Kemitraan dan partisipasi masyarakat	Optimalisasi peranan PPID dan ULPIM serta

No	Rencana Strategis			
	Nasional	Provinsi Jawa Timur	Kota Blitar	Dinas Kominfo dan Statistik
		Informasi dan Transparansi	untuk pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik dan pembangunan daerah	Peningkatan fungsi KIM dan Telecenter
3	Masalah keamanan Informasi	Pemberdayaan dan peran aktif masyarakat dalam penyebarluasan informasi	Teknologi Informasi mendorong partisipasi Masyarakat dalam pembangunan	Terwujudnya pengembangan data yang akurat dan terjamin keamanannya

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Terdapat beberapa faktor yang dapat dijadikan sebagai penentu keberhasilan Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Bila ditinjau dari Rencana Tata Ruang Wilayah, Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik mempunyai tugas membantu Walikota Blitar melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, bidang Statistik dan bidang persandian yang menjadi kewenangan daerah serta tugas pembantuan.

Dalam menjalankan Program yang dilaksanakan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik mendukung visi ke 5 yaitu “ Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Tehnologi Informasi”

Tabel 3.5

Permasalahan Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi OPD	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Pemasangan FO di Kota Blitar	Belum tercakupnya seluruh wilayah dengan FO secara serentak	Adanya pentahapan anggaran pemasangan FO	Kebutuhan jaringan internet untuk e-Gov sangat mendesak
2	Pengaturan pemasangan Menara Telekomunikasi	Kewenangan tidak diserahkan ke daerah	Belum adanya aturan terbaru yang mengatur	Kebutuhan masyarakat akan layanan telekomunikasi cukup besar

Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), pemerintah wajib menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar yang terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

KLHS ini selanjutnya wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam penyusunan perencanaan program pembangunan daerah, salah satunya dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar.

Penyusunan KLHS RPJMD berdasarkan Permendagri No. 7 Tahun 2018 dimaksudkan untuk memastikan bahwa isu strategis, permasalahan dan sasaran strategis Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) termuat dalam Rancangan RPJMD Kota Blitar.

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik memiliki tugas untuk menindaklanjuti salah satu rekomendasi KLHS dengan isu strategis Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Melalui PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK dengan salah satu kegiatannya yaitu Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah .

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Dinas Kominfo dan statistik yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang komunikasi dan informatika, statistik sektoral serta persandian dan keamanan informasi di daerah, setelah memperhatikan faktor eksternal, internal termasuk tantangan, kekuatan dan kelemahan yang telah dipaparkan maka ke depan dapat disimpulkan isu-isu strategis yang berkembang adalah :

1. Pengembangan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kota Blitar menuju terciptanya layanan umum dan administrasi pemerintahan yang sepenuhnya terdigital untuk mewujudkan smart city di Kota Blitar .
2. Pengembangan dan penguatan infrastruktur jaringan internet dan intranet Pemerintah Kota Blitar serta akses layanan internet untuk masyarakat guna mendukung digitalisasi di kota Blitar;
3. Pengembangan pemanfaatan layanan Data center untuk meningkatkan keamanan dan integrasi data serta interoperabilitas sistem pemerintahan berbasis elektronik di Kota Blitar;
4. Pengembangan penyediaan informasi dan dokumentasi berbasis elektronik;
5. Pengembangan kelompok informasi masyarakat guna penyebaran, penyediaan dan pemanfaatan informasi, yang dilaksanakan oleh pemerintah secara aktif, mengumpulkan informasi yang bermanfaat untuk dapat diakses oleh masyarakat ;
6. Pengembangan layanan informasi publik melalui media Pemerintah daerah yang berkualitas yang dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah dan cepat.
7. Pengembangan layanan satu data melalui sistem pemerintahan berbasis elektronik;
8. Pengembangan pelayanan persandian dan keamanan informasi seiring dengan pemanfaatan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja OPD selama lima tahun. Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel. 4.1.
Tujuan, Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kota Blitar Tahun 2022 – 2023

NO	TUJUAN / SASARAN	Indikator Tujuan / Sasaran	Rumus Perhitungan	Definisi Operasional	Kondisi Awal	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan / Sasaran			
					2020	2022	Realisasi	2023	Realisasi
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
1	TUJUAN : Meningkatnya Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	(Bobot x Domain Kebijakan SPBE) + (Bobot x Domain Tata Kelola SPBE) + (Bobot x Domain manajemen SPBE)+ (Bobot x Domain Layanan SPBE)	Penilaian SPBE dilakukan oleh KemenpanRB dan di dalamnya terdapat 4 domain yang terdiri dari domain kebijakan, tata kelola, manajemen, dan layanan SPBE. Setiap domain memiliki bobot dan nilai tingkat kematangan masing-masing dalam penilaian SPBE	2,88	2,31	2.81	2,63	2.81*
2	SASARAN 1: Meningkatnya layanan SPBE melalui kebijakan dan tata kelola TIK	Persentase layanan publik online dan terintegrasi	Jumlah Layanan publik online dan terintegrasi Jumlah layanan publik x 100 %	Layanan Publik Online Terintegrasi : Layanan untuk masyarakat yang disediakan dalam bentuk aplikasi atau sistem informasi dan terhubung dengan sistem yang lain	81	89	90	94	94
3	SASARAN 2: Meningkatnya Sistem Keterbukaan Informasi Publik	Nilai Hasil Monev PPID	Pemeringkatan Monev Keterbukaan Informasi Publik (Berdasarkan Perki No 1 Tahun 2022)	Hasil Monev Keterbukaan Informasi Publik adalah penilaian yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik	71	81	76	86	86

NO	TUJUAN / SASARAN	Indikator Tujuan / Sasaran	Rumus Perhitungan	Definisi Operasional	Kondisi Awal	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan / Sasaran			
					2020	2022	Realisasi	2023	Realisasi
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
4	SASARAN 3: Meningkatnya Permanfaatan Data Statistik Daerah	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan dan evaluasi pembangunan	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik utk perencanaan dan evaluasi pembangunan/ jumlah OPD X 100%`	Perencanaa OPD : Dokumen Renja Evaluasi Pembangunan : Dokumen LKJIP	94,83	96	100	97	100*
5	SASARAN 4: Meningkatnya Keamanan Informasi	Indeks KAMI	Jumlah nilai per area keamanan informasi/Jumlah area penilaian x 100 %	Nilai Per Area Keamanan Informasi : 7 Area Keamanan 1. tata kelola 2.Pengelolaan Resiko 3.Kerangka Kerja 4.Pengelolaan Aset 5.Teknologi 6.Suplemen 7.Katagori SE	20,31	38,76	39.4	46,51	46,51
6	TUJUAN : Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Kategori SAKIP PD berdasarkan evaluasi/penilaian dari Inspektorat Daerah Kota Blitar	Penilaian dari Inspektorat Daerah Kota Blitar	A 83,03	A 84,28	A 84,82	A 85	A 85
7	SASARAN : Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Kategori SAKIP PD berdasarkan evaluasi/penilaian dari Inspektorat Daerah Kota Blitar	Penilaian dari Inspektorat Daerah Kota Blitar	A 83,03	A 84,28	A 84,82	A 85	A 85

Catatan : *data sementara disamakan dengan realisasi tahun 2022

Tabel. 4.2
Tujuan, Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kota Blitar Tahun 2024 – 2026

NO	TUJUAN /SASARAN	Indikator Tujuan / Sasaran	Rumus Perhitungan	Definisi Operasional	Data Awal 2022	Target Kinerja Tujuan / Sasaran			
						2024	2025	2026	Akhir Periode Renstra
1	2	4	5	6		10	11	12	13
1	TUJUAN : Meningkatnya Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	(Bobot x Domain Kebijakan SPBE) + (Bobot x Domain Tata Kelola SPBE) + (Bobot x Domain manajemen SPBE)+ (Bobot x Domain Layanan SPBE)	Penilaian SPBE dilakukan oleh KemenpanRB dan di dalamnya terdapat 4 domain yang terdiri dari domain kebijakan, tata kelola, manajemen, dan layanan SPBE. Setiap domain memiliki bobot dan nilai tingkat kematangan masing-masing dalam penilaian SPBE	2,88	3,20	3,25	3,45	3,45
2	SASARAN 1: Meningkatnya kematangan layanan teknologi informasi komunikasi	Persentase layanan publik online dan terintegrasi	Jumlah Layanan publik online dan terintegrasi/ Jumlah layanan publik x 100 %	Layanan Publik Online Terintegrasi : Layanan untuk masyarakat yang disediakan dalam bentuk aplikasi atau sistem informasi dan terhubung dengan sistem yang lain	81	98%	100%	100%	100%
3	SASARAN 2: Meningkatnya Sistem Keterbukaan Informasi Publik	Nilai Hasil Monev PPID	Hasil Penilaian Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia No 1 Tahun 2022 Tentang Monitoring Dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik	Hasil Monev Keterbukaan Informasi Publik adalah penilaian yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik	71	91	96	100	100
		Presentase Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat	Jumlah pengaduan yang di tindaklanjuti di SP4N LAPOR / jumlah pengaduan yang masuk di SP4N LAPOR * 100%	SP4N Lapor adalah layanan yang mewedahi aspirasi dan pengaduan masyarakat untuk disalurkan kepada penyelenggara pelayanan publik yang berwenang sehingga aspirasi atau pengaduan yang masuk dapat ditindaklanjuti pihak terkait.		100%	100%	100%	100%

NO	TUJUAN /SASARAN	Indikator Tujuan / Sasaran	Rumus Perhitungan	Definisi Operasional	Data Awal 2022	Target Kinerja Tujuan / Sasaran			
						2024	2025	2026	Akhir Periode Renstra
1	2	4	5	6		10	11	12	13
4	SASARAN 3: Meningkatnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan dan evaluasi pembangunan	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik utk perencanaan dan evaluasi pembangunan/ jumlah OPD X 100%`	Perencanaa OPD : Dokumen Renja Evaluasi Pembangunan : Dokumen LKJIP	94,83	98%	99%	100%	100%
		Indeks Pembangunan Statistik	$\sum \text{ bobot domain } k \times \text{ nilaidomain } k$ $k=1$	Indeks Pembangunan Statistik : Ukuran yang menggambarkan kualitas penyelenggaraan Statistik Sektoral		2.7	2.9	3.1	3.1
5	SASARAN 4: Meningkatnya Keamanan Informasi	Indeks KAMI	Jumlah nilai per area keamanan informasi/Jumlah area penilaian x 100 %	Nilai Per Area Keamanan Informasi : 7 Area Keamanan 1. Tata kelola 2.Pengelolaan Resiko 3.Kerangja Kerja 4.Pengelolaan Aset 5.Teknologi 6.Suplemen 7.Katagori SE	20,31	54,26%	62,02%	69,77%	69,77
6	TUJUAN : Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat	Penilaian SAKIP dari Inspektorat Daerah Kota Blitar	A 83,03	A 86,25	A 87,5	A 88,75	A 88,75
7	SASARAN : Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat	Penilaian SAKIP dari Inspektorat Daerah Kota Blitar	A 83,03	A 86,25	A 87,5	A 88,75	A 88,75

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran strategis akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Rumusan strategi harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana OPD menciptakan nilai tambah (Added Value) bagi stakeholder layanan. Strategi adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang dijabarkan kedalam kebijakan-kebijakan dengan program-program. Strategi adalah merupakan faktor terpenting dalam proses perencanaan strategi, sebab strategi merupakan suatu rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya mewujudkan tujuan dan sasaran dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi dan keadaan lingkungan yang dihadapi.

Gambaran Keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan yang disusun oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Daerah Kota Blitar pada periode lima tahun mendatang disajikan pada tabel 5.1.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Daerah Kota Blitar

V I S I		:KOTA BLITAR KEREN, Unggul, Makmur, dan Bermartabat	
M I S I		:5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi	
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Meningkatnya kematangan layanan teknologi informasi komunikasi	Penguatan tata kelola SPBE	• Penguatan dan optimalisasi infrastruktur jaringan TIK • Peningkatan integrasi aplikasi layanan public
	Meningkatnya keterbukaan informasi publik	Peningkatan sistem keterbukaan informasi publik	• Peningkatan kualitas pemerintahan dan layanan publik • Peningkatan kemudahan akses publik terhadap data dan informasi publik
	Meningkatnya penyelenggaraan statistik sektoral	Peningkatan penyelenggaraan statistik sektoral	Peningkatan kuantitas dan kualitas Data Sektoral untuk mendukung Satu Data Indonesia
	Meningkatnya Keamanan Informasi	Peningkatan Keamanan Informasi	Peningkatan peran dan kapasitas BLITARKOTA-CSIRT

Tabel di atas dapat menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD periode berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan perangkat daerah. Jika terdapat pernyataan strategi atau arah kebijakan yang tidak relevan dan tidak konsisten dengan pernyataan lainnya, maka diperlukan perbaikan dalam proses perumusan strategi dan arah kebijakan tersebut.

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam rangka mengukur tingkat keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan diperlukan adanya indikator kinerja yang jelas. Dimana indikator kinerja merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja, baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi. Berpedoman pada RPJMD Kota Blitar 2016-2021, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik merumuskan Indikator Kinerja yang digunakan sebagai pedoman selama 5 tahun ke depan. Adapun indikator kinerja OPD tahun 2016-2021 disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Tahun 2022-2026

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan , Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program Kegiatan /Sub Kegiatan	Rumus perhitungan kegiatan/ Rumus perhitungan sub kegiatan	Satuan	Data Awal	Target Kinerja Program dan Kegiatan		Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan		Kondisi Kerja Perangkat Daerah Penanggun g Jawab	Lokasi
									2022		2022			
								2020	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	10	11	14	15
1	Meningkatnya Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik				Indeks Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	(Bobot x DomainKebijakan SPBE) + (Bobot x Domain Tata Kelola SPBE) + (Bobot x Layanan SPBE)	Indeks	2,88	2,31		2,81		Diskominfo tik	Kota Blitar
		Meningkatnya Sistem Keterbukaan Informasi Publik			Nilai Hasil Monev PPID	Pemeringkatan monev Keterbukaan informasi publik (Berdasarkan Perki 5 Tahun 2016)	persen	60	81	76			Diskominfo tik	Kota Blitar
				Program Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang Ditetapkan	Jumlah diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi dan SOP/jumlah diseminasi dan layanan informasi publik x 100%	persen	75	83%	2.564.813.096	83	1.941.345.572	Diskominfo tik	Kota Blitar
					Persentase komunitas masyarakat /mitra strategis pemerintahan daerah yang menyebar informasi dan kebijakan pemerintah daerah		persen	20	60%		60		Diskominfo tik	Kota Blitar

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan , Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program Kegiatan /Sub Kegiatan	Rumus perhitungan kegiatan/ Rumus perhitungan sub kegiatan	Satuan	Data Awal	Target Kinerja Program dan Kegiatan		Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan		Kondisi Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
									2022		2022			
								2020	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	10	11	14	15
				Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik/ jumlah masyarakat x 100%	persen		34%	2.564.813.096		2.700.482.670	Diskominfo tik	Kota Blitar
				Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah laporan Koordinasi perumusan kebijakan teknis bidang IKP	Jumlah koordinasi perumusan kebijakan teknis bidang IKP yang dilaksanakan pada tahun berjalan	kali		3	27.938.900	3	27.538.900	Diskominfo tik	Kota Blitar
					Jumlah dokumen rumusan kebijakan tehnis bidang IKP		dokumen		1					
				Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Tim Pemantau monitoring opini dan aspirasi publik yang terbentuk	Jumlah tim pemantau monitoring opini dan aspirasi publik yang dilaksanakan pada tahun berjalan	tim		5	16.959.400	5	16.709.400	Diskominfo tik	Kota Blitar
					Jumlah Isu Publik yang terpantau	Jumlah pemantauan isu publik yang dilaksanakan pada tahun berjalan	informasi		60		144	0	Diskominfo tik	Kota Blitar
					Jumlah pendapat Umum yang terhimpun	Jumlah pengumpulan pendapat umum yang dilaksanakan pada tahun berjalan	informasi		144		12	0	Diskominfo tik	Kota Blitar

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan , Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program Kegiatan /Sub Kegiatan	Rumus perhitungan kegiatan/ Rumus perhitungan sub kegiatan	Satuan	Data Awal	Target Kinerja Program dan Kegiatan		Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan		Kondisi Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
									2022		2022			
								2020	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	10	11	14	15
				Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah tim pemantau monitoring opini dan aspirasi publik yang dilaksanakan pada tahun berjalan	kali		12	6.247.000	12	1.337.000	Diskominfo tik	Kota Blitar
				Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah konten yang diproduksi	Jumlah pemantau isu publik yang dilaksanakan pada tahun berjalan	konten		500	174.116.500	500	209.643.428	Diskominfo tik	Kota Blitar
					Jumlah pengadaan sarana untuk pembuatan konten yang dikelola		sarana		5		5		Diskominfo tik	Kota Blitar
					Jumlah Sumber daya pemroduksi konten informasi publik yang dibina/difasilitasi		Orang		4		4		Diskominfo tik	Kota Blitar
					Jumlah dokumen Penyusunan strategi komunikasi publik yang tersusun		Dokumen		1		1		Diskominfo tik	Kota Blitar
				Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik pemerintah daerah yang dikelola	Jumlah pengumpulan pendapat umum yang dilaksanakan pada tahun berjalan	orang		11	###	11	###	Diskominfo tik	Kota Blitar

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan , Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program Kegiatan /Sub Kegiatan	Rumus perhitungan kegiatan/ Rumus perhitungan sub kegiatan	Satuan	Data Awal	Target Kinerja Program dan Kegiatan		Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan		Kondisi Kerja Perangkat Daerah Penanggun g Jawab	Lokasi
								2020	2022		2022			
									Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	10	11	14	15
					Jumlah Publikasi Media Luar Ruang (Baliho / videotron) yang dikelola		Kali		38		38		Diskominfo tik	Kota Blitar
					Jumlah Media luar ruang yang dipelihara (rumah baliho		unit		2		2		Diskominfo tik	Kota Blitar
					Jumlah Publikasi Website resmi yang difasilitasi/dikelol a		Inform asi		180		180		Diskominfo tik	Kota Blitar
					Jumlah Publikasi Media sosial yang difasilitasi/dikelol a		Kali		180		180		Diskominfo tik	Kota Blitar
					Jumlah Publikasi cetak (leaflet/poster dll)		kali		40		40		Diskominfo tik	Kota Blitar
				Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan informasi publik yang ditangani	Jumlah permohonan informasi publik,yang dilaksanakan pada tahun berjalan	Inform asi		5	609.320.700	5	536.701.453	Diskominfo tik	Kota Blitar
					Jumlah penyelesaian sengketa informasi publik		Sengke ta		1		1		Diskominfo tik	Kota Blitar

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan , Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program Kegiatan /Sub Kegiatan	Rumus perhitungan kegiatan/ Rumus perhitungan sub kegiatan	Satuan	Data Awal	Target Kinerja Program dan Kegiatan		Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan		Kondisi Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
								2020	2022		2022			
									Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	10	11	14	15
					Jumlah pengaduan masyarakat (ULPIM, LAPOR SP4N dan Call Center 112) yang tertangani		Pengaduan		120		120		Diskominfo tik	Kota Blitar
				Layanan Hubungan Media	Jumla Kerjasama Pemberitaan/penyampaian informasi dengan Media Massa	Jumlah penyelesaian sengketa informasi publik yang dilaksanakan pada tahun berjalan	Kali		995	767.795.996	995	809.087.200	Diskominfo tik	Kota Blitar
					Jumlah siaran pers yang terlaksana		Kali		5		5		Diskominfo tik	Kota Blitar
					Jumlah konferensi pers yang terlaksana		Kali		1		1		Diskominfo tik	Kota Blitar
					Jumlah laporan pemantau siaran pers di media		dokumen		1		1		Diskominfo tik	Kota Blitar

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan , Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program Kegiatan /Sub Kegiatan	Rumus perhitungan kegiatan/ Rumus perhitungan sub kegiatan	Satuan	Data Awal	Target Kinerja Program dan Kegiatan		Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan		Kondisi Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
								2020	2022		2022			
									Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	10	11	14	15
				Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah KIM yang dibina	Jumlah pengaduan yang tertangani-operasional pelayanan pengaduan masyarakat(ULPIM, LAPOR SP4N dan call center 112) yang dilaksanakan pada tahun berjalan	Kelompok		12	130.622.500	12	193.970.100	Diskominfo tik	Kota Blitar
					Jumlah Pertura yang di publikasikan		Kali		2		2		Diskominfo tik	Kota Blitar
					jumlah komunitas dan kelompok strategis yang dibina		kelompok		21		21		Diskominfo tik	Kota Blitar
				Manajemen Komunikasi Krisis	Jumlah Tim Komunikasi krisis,	Jumlah tim komunikasi krisis,yang dilaksanakan pada tahun berjalan	Tim		1	11.694.300	1	11.411.400	Diskominfo tik	Kota Blitar
					Jumlah dokumen SOP penanganan krisis yang disusun	Penyusunan SOP penanganan krisis,yang dilaksanakan pada tahun berjalan	Dokumen		1		0		Diskominfo tik	Kota Blitar
					Jumlah komunikasi krisis yang ditangani	Penanganan komunikasi krisis yang dilaksanakan pada tahun berjalan	Kali		1		0		Diskominfo tik	Kota Blitar

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan , Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program Kegiatan /Sub Kegiatan	Rumus perhitungan kegiatan/ Rumus perhitungan sub kegiatan	Satuan	Data Awal	Target Kinerja Program dan Kegiatan		Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan		Kondisi Kerja Perangkat Daerah Penanggun g Jawab	Lokasi
								2020	2022		2022			
									Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	10	11	14	15
				Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah peserta lokakarya/ webinar/bimtek pengembangan kapasitas sumber daya komunikasi publik	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah yang menyebar informasi dan kebijakan pemerintah daerah yang dilaksanakan pada tahun berjalan	orang		30	5.636.300	30	51.085.900	Diskominfo tik	Kota Blitar
				Penyelenggara n Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah BAKOHUMAS yang di bina		unit		80	18.322.600	0	0	Diskominfo tik	Kota Blitar
		Meningkatnya Layanan SPBE Melalui Kebijakan dan Tata Kelola TIK			Persentase layanan publik online dan terintegritasi	Indeks domain layanan SPBE	persen	89	90				Diskominfo tik	Kota Blitar
				Program aplikasi informatika	Persentase penerapan sistem elektronik dalam layanan publik	Rata rata persentase jaringan infrastruktur yang tersambung + persentase layanan spbe yang terintegrasi	persen	45,69	86,35%	7.213.911.948	86,66	7.906.547.392	Diskominfo tik	Kota Blitar

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan , Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program Kegiatan /Sub Kegiatan	Rumus perhitungan kegiatan/ Rumus perhitungan sub kegiatan	Satuan	Data Awal	Target Kinerja Program dan Kegiatan		Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan		Kondisi Kerja Perangkat Daerah Penanggun g Jawab	Lokasi
									2022		2022			
								2020	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	10	11	14	15
				Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kot a	Prosentase penerapan domain go.id / sub domaian pada aplikasi administrasi pemerintahan dan layanan public sesuai aturan	Jumlah domain go.id/sub domain pada aplikasi administrasi pemerintahan dan layanan public yang sesuai dengan perwali TIK			100%	6.033.779.702	100	6.574.191.793	Diskominfo tik	Kota Blitar
				Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kota	Jumlah Domain Pemerintah Kota yang di kelola	Jumlah domain pemerintah kota	domain		6	21.000.000	7	3.000.000	Diskominfo tik	Kota Blitar
					Jumlah sewa domain yang dibayar	Langganan sewa domain yang dilaksanakan setiap bulan	domain		12		12	0	Diskominfo tik	Kota Blitar
				Penatalaksanaa n dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraa n Pemerintahan Daerah Kota	Jumlah Lisensi Kontrol Panel Web Hosting	Jumlah IP cpanel yang tersedia	lisensi		2	56.307.600	1	34.389.000	Diskominfo tik	Kota Blitar
					Jumlah peserta Sosialisasi Penggunaan Nama Domain Sesuai Ketentuan		orang		50		50	16.863.500	Diskominfo tik	Kota Blitar

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan , Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program Kegiatan /Sub Kegiatan	Rumus perhitungan kegiatan/ Rumus perhitungan sub kegiatan	Satuan	Data Awal	Target Kinerja Program dan Kegiatan		Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan		Kondisi Kerja Perangkat Daerah Penanggun g Jawab	Lokasi
									2022		2022			
								2020	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	10	11	14	15
				Penyelenggaraa n Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah titik yang terhubung jaringan intra pemerintah	Jumlah titik yang terhubung jaringan intra pemerintah	Titik		60	5.986.472.102	60	6.530.328.293	Diskominfo tik	Kota Blitar
					Jumlah hotspot area publik yang dipelihara	Jumlah fasilitas hotspot yang terpelihara	Titik		50		12	306.872.000	Diskominfo tik	Kota Blitar
					Jumlah Fasilitas Jaringan publik (Hotspot RT dan Tempat umum)	Jumlah fasilitas jaringan public(hotspot RT dan tempat umum) yang terpasang	Bulan		12		4	666.375.000	Diskominfo tik	Kota Blitar
					Jumlah bandwidth internet	Jumlah sewa bandwidth internet	Bulan		12		12	2.662.813.612	Diskominfo tik	Kota Blitar
					Jumlah Lisensi Firewall	Jumlah sewa lisensi firewall	bulan		12				Diskominfo tik	Kota Blitar
					Jumlah Sarana Prasarana jaringan intra pemerintah yang di kelola	Jumlah sarana prasarana jaringan intra pemerintah daerah	Jenis		10				Diskominfo tik	Kota Blitar

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan , Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program Kegiatan /Sub Kegiatan	Rumus perhitungan kegiatan/ Rumus perhitungan sub kegiatan	Satuan	Data Awal	Target Kinerja Program dan Kegiatan		Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan		Kondisi Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
								2020	2022		2022			
									Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	10	11	14	15
				Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kot a	Prosentase ketersediaan aplikasi pemerintahan dan layananan publik a	Jumlah aplikasi pemerintahan dan layanan public yang tersedia/jumlah kebutuhan aplikasi pemerintahan dan layanan publik	persen		90,50%	1.180.132.246	12	1.821.988.750	Diskominfo tik	Kota Blitar
				Penatalaksanaa n dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraa n Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen kebijakan, dan penerapan standar teknis penyelenggaraan sistem elektronik pemda yang tersusun	Jumlah dokumen kebijakan dan standar teknis tersusun	Dokum en		1	81.758.700	0	1.332.355.599	Diskominfo tik	Kota Blitar
					Jumlah laporan monev SPBE yang dilaksanakan	Jumlah kegiatan koordinasi monev SPBE	dokum en		1		2	81.257.500	Diskominfo tik	Kota Blitar
				Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah dokumen Rencana Induk SPBE/TIK yang disusun/direvisi	Jumlah dokumen rencana induk spbe disusun/direview	Dokum en		0	1944000	0	0	Diskominfo tik	Kota Blitar

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan , Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program Kegiatan /Sub Kegiatan	Rumus perhitungan kegiatan/ Rumus perhitungan sub kegiatan	Satuan	Data Awal	Target Kinerja Program dan Kegiatan		Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan		Kondisi Kerja Perangkat Daerah Penanggun g Jawab	Lokasi
									2022		2022			
								2020	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	10	11	14	15
					Jumlah laporan evaluasi/ review berkala rencana induk SPBE /TIK yang dilaksanakan		dokum en		1		1	548.000	Diskominfo tik	Kota Blitar
				Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah infrastru ktur pusat data d aerah sesuai stan dar nasional	Jumlah penyediaan infrastruktur pusat data	Buah		1	56.000.000	1	54515000	Diskominfo tik	Kota Blitar
					Jumlah laporan koordinasi peman faatan pusat data daerah	Jumlah kegiatan koordinasi pemanfaatan pusat data daerah	dokum en		1				Diskominfo tik	Kota Blitar
					Jumlah kerjasam a dan fasilitasi pe ngelolaan data ele ktronik berbagi pa kai tingkat kota, provinsi dan pusa t	Jumlah kegiatan koordinasi pemanfaatan pusat data daerah	Instans i		4				Diskominfo tik	Kota Blitar
					Jumlah aplikasi monitoring pusat data yang di kembangkan	Jumlah pengembangan aplikasi monitoring keamanan terbangun	Aplikas i		0	48.785.800			Diskominfo tik	Kota Blitar
					Jumlah dokumen rencana keberlangsungan dan pemulihan layanan pusat data yang disusun	Jumlah pengembangan aplikasi monitoring keamanan terbangun	Dokum en		1				Diskominfo tik	Kota Blitar

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan , Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program Kegiatan /Sub Kegiatan	Rumus perhitungan kegiatan/ Rumus perhitungan sub kegiatan	Satuan	Data Awal	Target Kinerja Program dan Kegiatan		Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan		Kondisi Kerja Perangkat Daerah Penanggun g Jawab	Lokasi
									2022		2022			
								2020	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	10	11	14	15
				Penyelenggaraa n Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah perangkat Komunikasi berbasis suara (VOIP) dan video yang di kelola		Paket		60	710.192.176	5	304599000	Diskominfo tik	Kota Blitar
					Jumlah sarana Komunikasi berbasis video		Peket				12	0	Diskominfo tik	Kota Blitar
					Jumlah email resmi @mail.go.id yang di kelola		Alamat		3		12	40.194.000	Diskominfo tik	Kota Blitar
					Jumlah sarana cloud meeting berbasis suara dan video yang tersedia		Paket		1		3	45.400.000	Diskominfo tik	Kota Blitar
					Jumlah CCTV lingkungan tersedia		unit		300		0		Diskominfo tik	Kota Blitar
					Jumlah pemeliharaan CCTV lingkungan		Bulan		12				Diskominfo tik	Kota Blitar
				Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Jumlah Dokumen Standar Keamanan Sistem Informasi tersusun		dokum en			-	1	95.276.000	Diskominfo tik	Kota Blitar

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan , Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program Kegiatan /Sub Kegiatan	Rumus perhitungan kegiatan/ Rumus perhitungan sub kegiatan	Satuan	Data Awal	Target Kinerja Program dan Kegiatan		Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan		Kondisi Kerja Perangkat Daerah Penanggun g Jawab	Lokasi
								2020	2022		2022			
									Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	10	11	14	15
					Jumlah layanan pemerintah /publik yang menggunakan sertifikat elektronik .	Jumlah layanan aplikasi yang menggunakan sertifikat elektronik	Layana n		-				Diskominfo tik	Kota Blitar
					Jumlah aplikasi layanan yang menggunaan tandatangan elektronik .		Aplikas i						Diskominfo tik	Kota Blitar
				Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah peserta sosialisasi dan bimtek Pengelolaan situs Website/ Aplikasi dilaksanakan		orang		81	9.361.000	0	9.234.000	Diskominfo tik	Kota Blitar
					Jumlah konten dan situs web perangkat daerah yang difasilitasi		buah		0				Diskominfo tik	Kota Blitar
					Jumlah pengembangan situs web perangkat daerah yang difasilitasi		Aplikas i		0				Diskominfo tik	Kota Blitar
					Jumlah dokumen arsitektur SPBE disusun /direvie	Jumlah dokumen arsitektus SPBE disusun/direview	Dokum en		-				Diskominfo tik	Kota Blitar

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan , Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program Kegiatan /Sub Kegiatan	Rumus perhitungan kegiatan/ Rumus perhitungan sub kegiatan	Satuan	Data Awal	Target Kinerja Program dan Kegiatan		Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan		Kondisi Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
								2020	2022		2022			
									Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	10	11	14	15
					Jumlah tata kelola dokumen elektronik sesuai kebijakan satu data yang terintegrasi yang difasilitasi		Dokumen						Diskominfo tik	Kota Blitar
				Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah aplikasi dibangun/dikembangkan sesuai standar teknis dan keamanan	Jumlah aplikasi dibangun/dikembangkan sesuai standar teknis dan keamanan	Aplikasi		6	500.248.270	6	504.479.600	Diskominfo tik	Kota Blitar
					Jumlah sumber kode sumber (source code) aplikasi perangkat daerah tersimpan dalam pusat aplikasi (repository)	Jumlah aplikasi dibangun /dikembangkan sesuai standar teknis dan keamanan	Aplikasi		2				Diskominfo tik	Kota Blitar
					Jumlah dokumen kajian biaya dan manfaat pengembangan aplikasi daerah (aplikasi khusus)	Jumlah aplikasi dibangun/dikembangkan sesuai teknis dan keamanan	Dokumen		0				Diskominfo tik	Kota Blitar
					Jumlah dokumen laporan pemanfaatan aplikasi umum		Dokumen		1				Diskominfo tik	Kota Blitar

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan , Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program Kegiatan /Sub Kegiatan	Rumus perhitungan kegiatan/ Rumus perhitungan sub kegiatan	Satuan	Data Awal	Target Kinerja Program dan Kegiatan		Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan		Kondisi Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
								2020	2022		2022			
									Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	10	11	14	15
					Jumlah dokumen proses bisnis layanan pemerintah berbasis elektronik disusun/direview	Jumlah dokumen proses bisnis layanan pemerintah berbasis elektronik disusun/direview	Dokumen		0				Diskominfo tik	Kota Blitar
					Jumlah peserta sosialisasi penggunaan aplikasi layanan publik dan pemerintahan	Jumlah sosialisasi penggunaan aplikasi layanan public dan pemerintahan	orang		40				Diskominfo tik	Kota Blitar
					Jumlah bidang pelayanan aplikasi blitar in hand yang dibangun		aplikasi		1				Diskominfo tik	Kota Blitar
				Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah layanan cloud server di kelola	Jumlah layanan cloud server	Server			-	1	1.096.000	Diskominfo tik	Kota Blitar
					Jumlah aplikasi tersambung dalam sistem penghubung layanan (webservices)	Jumlah dokumen system penghubung layanan disusun /direview	buah		0				Diskominfo tik	Kota Blitar

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan , Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program Kegiatan /Sub Kegiatan	Rumus perhitungan kegiatan/ Rumus perhitungan sub kegiatan	Satuan	Data Awal	Target Kinerja Program dan Kegiatan		Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan		Kondisi Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
								2020	2022		2022			
									Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	10	11	14	15
				Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah dokumen kebijakan, dan tata kelola smart city yangndisusn/di review		Dokumen		0	4.316.000	2	4.220.000	Diskominfo tik	Kota Blitar
					Jumlah laporan koordinasi fasilitasi keterhubungan data dan informasi	Jumlah koordinasi fasilitasi keterhubungan data dan informasi	Dokumen		1		0	0	Diskominfo tik	Kota Blitar
					Jumlah sarana prasarana pendukung kota cerdas yang tersedia	Jumlah koordinasi fasilitasi keterhubungan data	Buah		0				Diskominfo tik	Kota Blitar
					Jumlah SDM pendukung kota cerdas yang di bina	Peningkatan kapasitas SDM	orang		0				Diskominfo tik	Kota Blitar
				Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah aplikasi pengelolaan aset dan penggunaan TIK yang dibangun/dikembangkan	Jumlah aplikasi pengelolaan aset dan layanan TIK dibangun/dikembangkan	Aplikasi		0	86.367.500	3	241.404.000	Diskominfo tik	Kota Blitar
					Jumlah peserta pelatihan dan bimtek TIK		Orang		21		10	0	Diskominfo tik	Kota Blitar

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan , Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program Kegiatan /Sub Kegiatan	Rumus perhitungan kegiatan/ Rumus perhitungan sub kegiatan	Satuan	Data Awal	Target Kinerja Program dan Kegiatan		Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan		Kondisi Kerja Perangkat Daerah Penanggun g Jawab	Lokasi
									2022		2022			
								2020	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	10	11	14	15
				Pengelolaan <i>Government Chief Information Officer (GCIO)</i>	Jumlah sistem elektronik (aplikasi) pemdayang terdaftar	Jumlah system elektronik (aplikasi) pemda yang terdaftar	Aplikas i		20	39948700	1	37185499	Diskominfo tik	Kota Blitar
					Jumlah ASN yang berkompeten dalam monev /assesment TI	Jumlah ASN berkompeten dalam monev/assesment TI	orang		2		1	0	Diskominfo tik	Kota Blitar
					Jumlah dokumen GCIO yang tersusun	Jumlah dokumen dan tim GCIO terbentuk	dokum en		1				Diskominfo tik	Kota Blitar
					Jumlah tim GCIO yang terbentuk		tim		1				Diskominfo tik	Kota Blitar
		Meningkatnya Pemanfaatan Data Statistik Daerah			Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan dan evaluasi pembangunan	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik utk perencanaan dan evaluasi pembangunan/ jumlah OPD X 100%`	persen	94,83	96				Diskominfo tik	Kota Blitar

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan , Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program Kegiatan /Sub Kegiatan	Rumus perhitungan kegiatan/ Rumus perhitungan sub kegiatan	Satuan	Data Awal	Target Kinerja Program dan Kegiatan		Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan		Kondisi Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
									2022		2022			
								2020	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	10	11	14	15
				Program penyelenggaraa n statistik sektoral	Persentase Data statistik yang terpublikasi menggunakan sistem elektronik	Jumlah elemen data yang dipublikasikan menggunakan system informasi/jumlah elemen data keseluruhan X 100%	persen	NA	93,43%	427.353.510	100	331.998.010	Diskominfo tik	Kota Blitar
				Penyelenggaraa n Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten / Kota	Presentase survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	Jumlah usulan survey statistic sektoral yang mendapatkan rekomendasi dari BPS/jumlah usulan survey statistic sektoral x 100%	persen		100%	350.971.000	3	256.142.300	Diskominfo tik	Kota Blitar
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Analisa data Satatistik yang tersusun	Jumlah dokumen analisa data statistik yang dilaksanakan pada tahun berjalan	dokum en		3	350.971.000	1	39.924.000	Diskominfo tik	Kota Blitar
					Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilaksanakan pada tahun berjalan	OPD		1		1	0	Diskominfo tik	Kota Blitar

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan , Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program Kegiatan /Sub Kegiatan	Rumus perhitungan kegiatan/ Rumus perhitungan sub kegiatan	Satuan	Data Awal	Target Kinerja Program dan Kegiatan		Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan		Kondisi Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
								2020	2022		2022			
									Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	10	11	14	15
					Jumlah Dokumen Profil Daerah Kota Blitar yang tersusun	Jumlah dokumen profil daerah kota blitar yang dilaksanakan pada tahun berjalan	dokumen		1				Diskominfo tik	Kota Blitar
					Presentase kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	Jumlah kompilasi statistic sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS yang dilaksanakan pada tahun berjalan	persen		100%	76.382.510			Diskominfo tik	Kota Blitar
				Peningkatan kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah Data yang terintegrasi dengan sistem Satu data	Jumlah data yang terintegrasi dengan sistem satu data yang dilaksanakan pada tahun berjalan	data		10	18.631.710	27	18.104.910	Diskominfo tik	Kota Blitar
					Jumlah tim Pengelola Satu Data di Kota Blitar yang terbentuk	Terwujudnya tim pengelola satu data di kota blitar yang dilaksanakan pada tahun berjalan	kali		4		27		Diskominfo tik	Kota Blitar

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan , Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program Kegiatan /Sub Kegiatan	Rumus perhitungan kegiatan/ Rumus perhitungan sub kegiatan	Satuan	Data Awal	Target Kinerja Program dan Kegiatan		Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan		Kondisi Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
									2022		2022			
								2020	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	10	11	14	15
				Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah laporan Koordinasi pembangunan metadata statistik sektoral	Jumlah koordinasi pembangunan metadata statistic sektoral yang dilaksanakan pada tahun berjalan	OPD		4	25.000.000	1	24.800.000	Diskominfo tik	Kota Blitar
					Jumlah dokumen metadata statistik sektoral	Jumlah metadata statistik sektoral yang dilaksanakan pada tahun berjalan	data		4				Diskominfo tik	Kota Blitar
				Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah laporan Koordinasi dengan pemaangku kepentingan	Jumlah koordinasi dengan pemangku kepentingan yang dilaksanakan pada tahun berjalan	kali		4	3.288.000	1	3.288.000	Diskominfo tik	Kota Blitar
					Jumlah peserta Peningkatan kapasitas kelembagaan statistik sektoral	Jumlah peningkatan kapasitas kelembagaan statistik sektoral yang dilaksanakan pada tahun berjalan	orang		4				Diskominfo tik	Kota Blitar
				Pengembangan Infrastruktur	Jumlah sarana dan prasara pendukung operasional penyelenggaraan statistik sektoral	Jumlah sarana dan prasarana pendukung operasional penyelenggaraan statistic sektoral yang dilaksanakan pada tahun berjalan	menu		1	25.000.000	1	25.200.000	Diskominfo tik	Kota Blitar

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan , Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program Kegiatan /Sub Kegiatan	Rumus perhitungan kegiatan/ Rumus perhitungan sub kegiatan	Satuan	Data Awal	Target Kinerja Program dan Kegiatan		Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan		Kondisi Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
								2020	2022		2022			
									Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	10	11	14	15
				Penyelenggaraa n Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah Dokumen otorisasi data statistik sektoral	Jumlah dokumen otorisasi data statistic sektoral yang dilaksanakan pada tahun berjalan	OPD		10	4.462.800	24	4.462.800	Diskominfo tik	Kota Blitar
					Jumlah Rekom dari BPS yang ditindaklanjuti	Jumlah rekom dari BPS yang dilaksanakan pada tahun berjalan	kali		10		34		Diskominfo tik	Kota Blitar
					Jumlah laporan koordinasi Pengambilan keputusan terkait data statistik sektoral		Dokum en		4				Diskominfo tik	Kota Blitar
		Meningkatnya Keamanan Informasi			Indeks KAMI	Jumlah nilai per area keamanan informasi/Jumlah area penilaian x 100 %	Indeks	20,31	38,76	358.315.370			Diskominfo tik	Kota Blitar
				Program penyelenggaraa n persandian untuk pengamanan informasi	Persentase implementasi Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		persen		38,76%	358.315.370	39,40178039	386.725.576	Diskominfo tik	Kota Blitar

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan , Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program Kegiatan /Sub Kegiatan	Rumus perhitungan kegiatan/ Rumus perhitungan sub kegiatan	Satuan	Data Awal	Target Kinerja Program dan Kegiatan		Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan		Kondisi Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
								2020	2022		2022			
									Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	10	11	14	15
				Penyelenggaraa n Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kot a	Kepatuhan OPD terhadap penerapan persandian untuk pengamanan informasi pemerintsh daerah kab/kota	Jumlah OPD yang memanfaatkan sertifikat elektronik pada persuratan / sitem elektronik dibandingkan dengan jumlah seluruh OPD					39,3991 9193	230688150	Diskominfo tik	Kota Blitar
				Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kot a	Jumlah dokumen rencana strategis Informasi yang disusun	Jumlah dokumen rencana strategis pengamanan informasi yang dilaksanakan pada tahun berjalan	dokum en		1	123.773.64 0	1		Diskominfo tik	Kota Blitar
					Jumlah peraturan tentang kebijakan tata kelola keamanan informasi dan jaring komunikasi sandi yang tersusun	Jumlah peraturan tentang kebijakan tata kelola keamanan informasi dan jaring komunikasi sandi yang dilaksanakan pada tahun berjalan	buah		2		2		Diskominfo tik	Kota Blitar

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan , Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program Kegiatan /Sub Kegiatan	Rumus perhitungan kegiatan/ Rumus perhitungan sub kegiatan	Satuan	Data Awal	Target Kinerja Program dan Kegiatan		Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan		Kondisi Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
								2020	2022		2022			
									Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	10	11	14	15
					Jumlah standar operasional prosedur (SOP) tata kelola keamanan informasi dan jaring komunikasi sandi yang tersusun	Jumlah standar operasional prosedur (SOP) tata kelola keamanan informasi dan jaring komunikasi sandi yang dilaksanakan pada tahun berjalan	buah		3		2		Diskominfo tik	Kota Blitar
					Jumlah laporan sosialisasi tata kelola keamanan informasi dan jaring komunikasi sandi	Jumlah koordinasi / sosialisasi tata kelola keamanan informasi dan jaring komunikasi yang dilaksanakan pada tahun berjalan	dokumen		2		1	0	Diskominfo tik	Kota Blitar
					Jumlah peserta sosialisasi tata kelola keamanan informasi dan jaring komunikasi sandi		orang		80				Diskominfo tik	Kota Blitar
				Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen analisis kebutuhan dan pengelolaan sumber daya keamanan informasi yang tersusun	Jumlah dokumen analisis kebutuhan dan pengelolaan sumber daya keamanan informasi yang dilaksanakan pada tahun berjalan	dokumen		1	51.442.820	1	51.045.540	Diskominfo tik	Kota Blitar

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan , Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program Kegiatan /Sub Kegiatan	Rumus perhitungan kegiatan/ Rumus perhitungan sub kegiatan	Satuan	Data Awal	Target Kinerja Program dan Kegiatan		Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan		Kondisi Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
								2020	2022		2022			
									Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	10	11	14	15
					Jumlah peserta Pengembangan kompetensi sumber daya keamanan informasi	Jumlah Pengembangan kompetensi sumber daya keamanan informasi yang dilaksanakan pada tahun berjalan	orang		120		3		Diskominfo tik	Kota Blitar
					Jumlah penyediaan peralatan pengelolaan aset keamanan teknologi informasi dan komunikasi yang tersedia	Jumlah penyediaan pengelolaan aset keamanan teknologi informasi dan komunikasi yang dilaksanakan pada tahun berjalan	unit		2		2		Diskominfo tik	Kota Blitar
				Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kot a Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah laporan audit keamanan informasi dan sistem aplikasi secara berkala	Jumlah audit keamanan informasi dan sistem aplikasi secara berkala yang dilaksanakan pada tahun berjalan	dokum en		1	35.782.340	1	35.764.240	Diskominfo tik	Kota Blitar
					Jumlah laporan koordinasi, identifikasi, deteksi, proteksi, penanggulangan dan pemulihan insiden keamanan informasi	Jumlah koordinasi, identifikasi, deteksi, proteksi, penanggulangan dan pemulihan insiden keamanan informasi yang dilaksanakan pada tahun berjalan	dokum en		1		1		Diskominfo tik	Kota Blitar

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan , Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program Kegiatan /Sub Kegiatan	Rumus perhitungan kegiatan/ Rumus perhitungan sub kegiatan	Satuan	Data Awal	Target Kinerja Program dan Kegiatan		Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan		Kondisi Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
									2022		2022			
								2020	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	10	11	14	15
					Jumlah pengguna layanan pengajuan sertifikat elektronik	Jumlah layanan pengajuan sertifikat elektronik yang dilaksanakan pada tahun berjalan	orang		48		1		Diskominfo tik	Kota Blitar
					Jumlah peserta koordinasi, sosialisasi pengamanan informasi non elektronik	Jumlah koordinasi, sosialisasi pengamanan informasi non elektronik yang dilaksanaorn pada tahun berjalan	orang		40		48		Diskominfo tik	Kota Blitar
				Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kot a	Jumlah Layanan Keamanan Informasi yang tersedia	Jumlah Penyediaan Layanan Keamanan Informasi yang dilaksanakan pada tahun berjalan	kali		1	19.220.740	1	19.136.390	Diskominfo tik	Kota Blitar
					Jumlah pengguna layanan keamanan informasi	Jumlah pengguna layanan keamanan informasi yang dilaksanakan pada tahun berjalan	orang		48		48		Diskominfo tik	Kota Blitar
											5			
					Jumlah laporan koordinasi, dan evaluasi layanan keamanan informasi		dokum en		1				Diskominfo tik	Kota Blitar

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan , Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program Kegiatan /Sub Kegiatan	Rumus perhitungan kegiatan/ Rumus perhitungan sub kegiatan	Satuan	Data Awal	Target Kinerja Program dan Kegiatan		Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan		Kondisi Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
								2020	2022		2022			
									Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	10	11	14	15
					Jumlah peserta sosialisasi layanan keamanan informasi	Jumlah koordinasi, sosialisasi dan evaluasi layanan keamanan informasi yang dilaksanaorn pada tahun berjalan	orang		40				Diskominfo tik	Kota Blitar
				Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kot a	Persentase penerapan pola hubungan komunikasi sandi	Persentase penerapan pola hubungan komunikasi sandi yang dilaksanakan pada tahun berjalan	persen		25%	128.096.040	25	156.037.426	Diskominfo tik	Kota Blitar
				Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kot a	Jumlah laporan koordinasi, dan evaluasi jaring komunikasi sandi	Jumlah koordinasi, sosialisasi dan evaluasi jaring komunikasi sandi yang dilaksanakan pada tahun berjalan	dokum en		1	128.096.040	1	156.037.426	Diskominfo tik	Kota Blitar
					Jumlah peserta sosialisasi jaring komunikasi sandi	Jumlah layanan jaring komunikasi sandi antar perangkat daerah yang dilaksanabun pada tahun berjalan	orang		40		1		Diskominfo tik	Kota Blitar
					Jumlah layanan jaring komunikasi sandi antar perangkat daerah yang di kelola	Jumlah layanan jaring komunikasi sandi antar perangkat daerah yang dilaksanabun pada tahun berjalan	buah		1		1		Diskominfo tik	Kota Blitar

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan , Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program Kegiatan /Sub Kegiatan	Rumus perhitungan kegiatan/ Rumus perhitungan sub kegiatan	Satuan	Data Awal	Target Kinerja Program dan Kegiatan		Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan		Kondisi Kerja Perangkat Daerah Penanggun g Jawab	Lokasi
									2022		2022			
								2020	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	10	11	14	15
					Jumlah layanan jaring komunikasi sandi internal perangkat daerah yang di kelola	Jumlah layanan jaring komunikasi sandi internal perangkat daerah yang dilaksanabun pada tahun berjalan	buah		1		1		Diskominfo tik	Kota Blitar
					Jumlah layanan jaring komunikasi sandi pimpinan daerah yang di kelola	Jumlah layanan jaring komunikasi sandi pimpinan daerah yang dilaksanabun pada tahun berjalan	buah		1				Diskominfo tik	Kota Blitar
2	Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah				Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Kategori SAKIP PD berdasarkan evaluasi/penilaian dari Inspektorat Daerah Kota Blitar	Nilai	A	A				Diskominfo tik	Kota Blitar
		Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah		Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Nilai Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah dokumen IKM yang disusun / dokumen x 100%	Indeks	Baik	84	6.884.694.624	84,09	5.126.322.719	Diskominfo tik	Kota Blitar
				Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standart	Jml dok perencanaan dan pelaporan tersusun tepat waktu /Jml dok perencanaan dan pelaporan yang harus tersusun x 100%	persen		100%	41.668.300	100	34.695.000	Diskominfo tik	Kota Blitar

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan , Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program Kegiatan /Sub Kegiatan	Rumus perhitungan kegiatan/ Rumus perhitungan sub kegiatan	Satuan	Data Awal	Target Kinerja Program dan Kegiatan		Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan		Kondisi Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
								2020	2022		2022			
									Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	10	11	14	15
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun (Renstra , PK, IKU , IKI , SOP, SPP Renaksi, Renja , DPA, PRKA, DPPA)	Jumlah jenis dokumen perencanaan perangkat Daerah yang tersusun dilaksanakan pada tahun berjalan	jenis		11	16.668.300	11	2.335.000	Diskominfo tik	Kota Blitar
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah jenis dokumen perencanaan perangkat Daerah yang tersusun (LKJiP, LKPJ, LPPD , SKM, Evaluasi RKPD , Pengukuran Kinerja Tibulanan)	Jumlah jenis dokumen perencanaan perangkat Daerah yang tersusun dilaksanakan pada tahun berjalan	jenis		7	25.000.000	7	24.800.000	Diskominfo tik	Kota Blitar
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ZI	Jumlah dokumen Zona Integritas yang dilaksanakan pada tahun berjalan	Jenis		1	10.000.000	2	7.560.000	Diskominfo tik	Kota Blitar
				Administrasi Keuangan Perangkat Dearah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	Jml pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah yang sesuai standar /Jml pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah x 100%	persen		100%	4.137.162.900	100	3.643.127.534	Diskominfo tik	Kota Blitar

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan , Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program Kegiatan /Sub Kegiatan	Rumus perhitungan kegiatan/ Rumus perhitungan sub kegiatan	Satuan	Data Awal	Target Kinerja Program dan Kegiatan		Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan		Kondisi Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
								2020	2022		2022			
									Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	10	11	14	15
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang Dibayarkan	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang Dibayarkan pada tahun berjalan	jenis		2	4.129.463.000	5	3.635.467.034	Diskominfo tik	Kota Blitar
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan /Semesteran	Jumlah jenis laporan Keuangan yang disusun	Jumlah jenis laporan Keuangan yang disusun pada tahun berjalan	laporan		4	7.699.900	6	7.660.500	Diskominfo tik	Kota Blitar
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	Jml pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar /Jml pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah x 100%	persen		100%	1.283.354.100	100	93.978.000	Diskominfo tik	Kota Blitar
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas dan Kelengkapannya yang terpenuhi	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya /jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya	stel		51	25.304.000	68	25.296.000	Diskominfo tik	Kota Blitar
				Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah event daerah dan hari besar nasional yang diikuti	Jumlah event daerah dan hari besar nasional yang diikuti pada tahun berjalan	event		4	#####	4	68.682.000	Diskominfo tik	Kota Blitar
					Jumlah konten pada baliho	Jumlah konten pada baliho yang terpasang pada tahun berjalan	kali		50		-		Diskominfo tik	Kota Blitar

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan , Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program Kegiatan /Sub Kegiatan	Rumus perhitungan kegiatan/ Rumus perhitungan sub kegiatan	Satuan	Data Awal	Target Kinerja Program dan Kegiatan		Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan		Kondisi Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
								2020	2022		2022			
									Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	10	11	14	15
					Jumlah pegawai yang mendapatkan fasilitasi pembinaan kepegawaian	Jumlah event daerah dan hari besar nasional yang diikuti pada tahun berjalan	orang		34		-		Diskominfo tik	Kota Blitar
					Jumlah pembuatan video pendek	Jumlah pembuatan video pendek yang dilaksanakan pada tahun berjalan	paket		2		-		Diskominfo tik	Kota Blitar
					Jumlah publikasi program / kegiatan perangkat Daerah	Jumlah publikasi program / kegiatan perangkat Daerah	publika si		4		-		Diskominfo tik	Kota Blitar
					Jumlah sosialisasi melalui media cetak	Jumlah sosialisasi melalui media cetak yang dilaksanakan di tahun berjalan	kali		20		-		Diskominfo tik	Kota Blitar
					Jumlah sosialisasi melalui media elektronik	Jumlah sosialisasi melalui media elektronik yang dilaksanakan tahun berjalan	kali		80		-		Diskominfo tik	Kota Blitar
					Jumlah sosialisasi tatap muka	Jumlah sosialisasi tatap muka yang dilaksanakan pada tahun berjalan	kali		2		-		Diskominfo tik	Kota Blitar
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	Jml administrasi umum perangkat daerah yang tersedia /Jml administrasi umum perangkat daerah yang harus tersedia x 100%	persen		100%	374.935.724	100	558.014.289	Diskominfo tik	Kota Blitar

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan , Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program Kegiatan /Sub Kegiatan	Rumus perhitungan kegiatan/ Rumus perhitungan sub kegiatan	Satuan	Data Awal	Target Kinerja Program dan Kegiatan		Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan		Kondisi Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
								2020	2022		2022			
									Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	10	11	14	15
				Penyediaan komponen instalasi listrik/ Penerangan bangunan kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan yang disediakan pada tahun berjalan	jenis		16	16.990.000	16	16.927.000	Diskominfo tik	Kota Blitar
				Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang tersedia	Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang tersedia pada tahun berjalan	jenis		20	32.349.324	20	40.082.000	Diskominfo tik	Kota Blitar
				Penyediaan bahan Logistik kantor	Jumlah dos/kotak/porsi makanan dan minuman yang tersedia	Jumlah dos/kotak/porsi makanan dan minuman yang disediakan pada tahun berjalan	dos		1500	89.896.400	995	293.562.485	Diskominfo tik	Kota Blitar
					Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia	Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia pada tahun berjalan	jenis		26		24		Diskominfo tik	Kota Blitar
				Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan yang tersedia	Jumlah barang cetakan yang tersedia pada tahun berjalan	jenis		6	13.850.000	6	11.515.700	Diskominfo tik	Kota Blitar
					Jumlah lembar penggandaan	Jumlah lembar penggandaan yang diadakan pada tahun berjalan	lembar		14.000		3		Diskominfo tik	Kota Blitar
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang tersedia	Jumlah bahan bacaan yang terlaksana pada tahun berjalan	eksemp lar		3	9.750.000	3	4.584.000	Diskominfo tik	Kota Blitar

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan , Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program Kegiatan /Sub Kegiatan	Rumus perhitungan kegiatan/ Rumus perhitungan sub kegiatan	Satuan	Data Awal	Target Kinerja Program dan Kegiatan		Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan		Kondisi Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
									2022		2022			
								2020	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	10	11	14	15
				Penyelenggaraa n Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi regional dan nasional yang tercukupi	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi regional dan nasional yang dilaksanakan pada tahun berjalan	Rapat Koordi nasi		37	212.100.000	37	191.343.104	Diskominfo tik	Kota Blitar
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standart	Jml penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia/Jml layanan penunjang urusan pemerintahan x 100%	persen		100%	408.610.000	100	149.452.400	Diskominfo tik	Kota Blitar
				Penyediaan jasa komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening listrik yang terbayarkan (termasuk listrik,air,telpon,in ternet)	Jumlah rekening listrik yang terbayarkan pada tahun berjalan	rekenin g		4	408.610.000	2	149.452.400	Diskominfo tik	Kota Blitar
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standart	Jml penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia/Jml layanan penunjang urusan pemerintahan x 100%	persen		100%	338.963.600	100	344.488.523	Diskominfo tik	Kota Blitar

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan , Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program Kegiatan /Sub Kegiatan	Rumus perhitungan kegiatan/ Rumus perhitungan sub kegiatan	Satuan	Data Awal	Target Kinerja Program dan Kegiatan		Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan		Kondisi Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
									2022		2022			
								2020	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	10	11	14	15
				Penyediaan jasa Pemeliharaan , Biaya Permeliharaan , Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara pada tahun berjalan	unit		8	121.602.800	9	344.488.523	Diskominfo tik	Kota Blitar
					Jumlah kendaraan dinas yabg terbayarkan pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yabg terbayarkan pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan pada tahun yang berjalan	unit		8		100	406.909.722	Diskominfo tik	Kota Blitar
				Pemeliharaan peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah bangunan kantor yang terpelihara (termasuk komputer,laptop, PC, printer Scanner , Kamera , Mesin Fax)	Jumlah bangunan kantor yang terpelihara pada tahun berjalan	jenis		8	49.380.800	8	126.092.700	Diskominfo tik	Kota Blitar
				Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Jumlah bangunan kantor yang terpelihara	Jumlah bangunan kantor yang terpelihara yang dilaksanakan pada tahun berjalan	unit		2	101.130.000	8		Diskominfo tik	Kota Blitar

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan , Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program Kegiatan /Sub Kegiatan	Rumus perhitungan kegiatan/ Rumus perhitungan sub kegiatan	Satuan	Data Awal	Target Kinerja Program dan Kegiatan		Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan		Kondisi Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
									2022		2022			
								2020	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	10	11	14	15
				Pemeliharaan/R rehabilitasi Sarana Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang terpelihara (termasuk AC, Exhaust fan,kipas angin yang menempel di dinding , Mebelair)	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang terpelihara dilaksanakan pada tahun berjalan	jenis		6	66.850.000	8	48.792.722	Diskominfo tik	Kota Blitar
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standart	Jumlah BMD penunjang urusan yang tersedia / jumlah BMD penunjang urusan sesuai kebutuhan x 100%	persen		100%	150.000.000	2	135.606.000	Diskominfo tik	Kota Blitar
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah jenis pengadaan Sarana prasarana pendukung gedung kantor yang tersedia	Jumlah jenis pengadaan Sarana prasarana pendukung gedung kantor yang tersedia dilaksanakan pada tahun berjalan	jenis		7	150.000.000	6	90.250.000	Diskominfo tik	Kota Blitar

Tabel 6.2 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2023

Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan	Satuan	Target Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Dan Kerangka Pendanaan 2023		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					K	Rp		
1	2	3	4	6	7	8	9	10
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							
	Tujuan 1 : Meningkatkan Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	(Bobot x Domain Kebijakan SPBE) + (Bobot x Domain Tata Kelola SPBE) + (Bobot x Layanan SPBE)				Diskominfo	kota Blitar
	SASARAN 1: Meningkatnya layanan SPBE melalui kebijakan dan tata kelola TIK	Persentase layanan publik online dan terintegrasi	Jumlah Layanan publik online dan terintegrasi/ Jumlah layanan publik x 100 %	Persen	94		Diskominfo	kota Blitar
2.16.03	Program Aplikasi Informatika	Persentase penerapan sistem elektronik dalam layanan publik	Rata rata persentase jaringan infrastruktur yang tersambung + persentase layanan spbe yang terintegrasi	Persen	90	8.058.813.219	Diskominfo	kota Blitar
2.16.03.2.01.	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Presentase penerapan domain go.id / sub domaian pada aplikasi administrasi pemerintahan dan layanan public sesuai aturan		Persen	100	6.337.534.067	Diskominfo	kota Blitar
2.16.03.2.01.01	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah	Domain	6	21.300.000	Diskominfo	kota Blitar

Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan	Satuan	Target Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Dan Kerangka Pendanaan 2023		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					K	Rp		
1	2	3	4	6	7	8	9	10
2.16.03.2.01.02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	60.438.360	Diskominfo	kota Blitar
2.16.03.2.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Unit	3	6.285.795.707	Diskominfo	kota Blitar
2.16.03.2.02.	Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Presentase ketersediaan aplikasi pemerintahan dan layanan publik	Jumlah aplikasi pemerintahan dan layanan public yang tersedia/jumlah kebutuhan aplikasi pemerintahan dan layanan publik x 100%		93	1.721.279.152	Diskominfo	kota Blitar
2.16.03.2.02.01	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E - Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E - Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	72.096.635	Diskominfo	kota Blitar
2.16.03.2.02.02	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Dokumen	1	77.041.200	Diskominfo	kota Blitar
2.16.03.2.02.03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	Unit	1	181.210.000	Diskominfo	kota Blitar

Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan	Satuan	Target Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Dan Kerangka Pendanaan 2023		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					K	Rp		
1	2	3	4	6	7	8	9	10
2.16.03.2.02.04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Dokumen	1	748.000.000	Diskominfo	kota Blitar
2.16.03.2.02.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Dokumen	2	270.063.600	Diskominfo	kota Blitar
2.16.03.2.02.06	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Perangkat	1	70.000.000	Diskominfo	kota Blitar
2.16.03.2.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	Unit	2	682.860.684	Diskominfo	kota Blitar
2.16.03.2.02.08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Layanan	1	12.000.000	Diskominfo	kota Blitar
2.16.03.2.02.09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	Dokumen	1	22.500.000	Diskominfo	kota Blitar

Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan	Satuan	Target Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Dan Kerangka Pendanaan 2023		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					K	Rp		
1	2	3	4	6	7	8	9	10
2.16.03.2.02.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Dokumen	1	269.739.740	Diskominfo	kota Blitar
2.16.03.2.02.11	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Dokumen	1	1.717.062	Diskominfo	kota Blitar
	SASARAN 2: Meningkatnya Sistem Keterbukaan Informasi Publik	Nilai Hasil Monev PPID	Pemeringkatan Monev Keterbukaan informasi publik (Berdasarkan Perki 1 Tahun 2022)	Angka	86		Diskominfo	kota Blitar
2.16.02	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang Ditetapkan Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah daerah			85 70	2.693.053.751	Diskominfo	kota Blitar
2.16.02.2.01.	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik/ jumlah masyarakat x 100%	Persen	45,5	2.693.053.751	Diskominfo	kota Blitar

Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan	Satuan	Target Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Dan Kerangka Pendanaan 2023		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					K	Rp		
1	2	3	4	6	7	8	9	10
2.16.02.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Dokumen	2	29.335.845	Diskominfo	kota Blitar
2.16.02.2.01.02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Dokumen	4	17.220.910	Diskominfo	kota Blitar
2.16.02.2.01.03	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Dokumen	12	6.559.350	Diskominfo	kota Blitar
2.16.02.2.01.04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Dokumen	510	182.822.325	Diskominfo	kota Blitar
	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya		30	14.100.522	Diskominfo	kota Blitar
2.16.02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Dokumen	11	835.966.845	Diskominfo	kota Blitar
2.16.02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Dokumen	5	639.786.735	Diskominfo	kota Blitar
2.16.02.2.01.07	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	Layanan	1000	806.185.796	Diskominfo	kota Blitar

Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan	Satuan	Target Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Dan Kerangka Pendanaan 2023		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					K	Rp		
1	2	3	4	6	7	8	9	10
2.16.02.2.01.08	Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	Dokumen	1	137.153.625	Diskominfo	kota Blitar
2.16.02.2.01.09	Manajemen Komunikasi Krisis	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Manajemen Komunikasi Krisis	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Manajemen Komunikasi Krisis	Dokumen	1	12.279.015	Diskominfo	kota Blitar
2.16.02.2.01.0010	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkat Kapasitasnya	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkat Kapasitasnya	Orang	30	5.918.115	Diskominfo	kota Blitar
2.16.02.2.01.0012	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	Dokumen	80	19.238.730	Diskominfo	kota Blitar
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK			Persen			Diskominfo	kota Blitar
	SASARAN 3 : Meningkatnya Permanfaatan Data Statistik Daerah	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan dan evaluasi pembangunan	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik utk perencanaan dan evaluasi pembangunan/ jumlah OPD X 100%`	Persen	97		Diskominfo	kota Blitar
2.20.02	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Data statistik yang terpublikasi menggunakan sistem elektronik		Persen	95,07	505.201.636	Diskominfo	kota Blitar

Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan	Satuan	Target Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Dan Kerangka Pendanaan 2023		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					K	Rp		
1	2	3	4	6	7	8	9	10
2.20.02.2.01.	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten / Kota	Presentase survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	Jumlah usulan survey statistic sektoral yang mendapatkan rekomendasi dari BPS/jumlah usulan survey statistic sektoral x 100%	Persen	100	425.000.000	Diskominfo	kota Blitar
2.20.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	dokumen	5	425.000.000	Diskominfo	kota Blitar
2.20.02.2.01.02	Peningkatan Kapasitas SDM Pemda dalam peningkatan mutu Statistik Daerah yang terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	orang	10	19.563.296	Diskominfo	kota Blitar
2.20.02.2.01.03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	dokumen	8	26.250.000	Diskominfo	kota Blitar
2.20.02.2.01.04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	orang	8	3.452.400	Diskominfo	kota Blitar
2.20.02.2.01.05	Pengembangan Infrastruktur	Jumlah Infrastruktur Statistik	Jumlah Infrastruktur Statistik	unit	1	26.250.000	Diskominfo	kota Blitar
2.20.02.2.01.06	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun	Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun	dokumen	1	4.685.940	Diskominfo	kota Blitar

Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan	Satuan	Target Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Dan Kerangka Pendanaan 2023		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					K	Rp		
1	2	3	4	6	7	8	9	10
2.21.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN						Diskominfo	kota Blitar
	SASARAN 4: Meningkatnya Keamanan Informasi	Indeks KAMI	Jumlah nilai per area keamanan informasi/Jumlah area penilaian x 100 %	Indeks	46,51		Diskominfo	kota Blitar
2.21.02.	Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	Persentase implementasi Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		persen	46,51	376.231.359	Diskominfo	kota Blitar
2.21.02.2.01.	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kepatuhan OPD terhadap penerapan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah kab/kota	Jumlah OPD yang memanfaatkan sertifikat elektronik pada persuratan / sitem elektronik dibandingkan dengan jumlah seluruh OPD	Persen	46,51	241.730.517	Diskominfo	kota Blitar
2.21.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	dokumen	1	129.962.322	Diskominfo	kota Blitar
2.21.02.2.01.02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	laporan	6	54.014.961	Diskominfo	kota Blitar

Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan	Satuan	Target Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Dan Kerangka Pendanaan 2023		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					K	Rp		
1	2	3	4	6	7	8	9	10
2.21.02.2.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	laporan	3	37.571.457	Diskominfo	kota Blitar
2.21.02.2.01.04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	perangkat daerah	20	20.181.777	Diskominfo	kota Blitar
2.21.02.2.02.	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penerapan pola hubungan komunikasi sandi	Persentase penerapan pola hubungan komunikasi sandi yang dilaksanakan pada tahun berjalan	Persen	35	134.500.842	Diskominfo	kota Blitar
2.21.02.2.02.01	Operasionalisasi Jaring komunikasi sandi Pememerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi		20	134.500.842	Diskominfo	kota Blitar
2.16.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah dokumen IKM yang disusun / dokumen x 100%	Indeks	Baik (79-84)	5.629.451.538,01	Diskominfo	kota Blitar
2.16.01.2.01.	Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standart	Jml dok perencanaan dan pelaporan tersusun tepat waktu /Jml dok perencanaan dan pelaporan yang harus tersusun x 100%	Persen	100	43.751.715	Diskominfo	kota Blitar
2.16.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	11	17.501.715	Diskominfo	kota Blitar

Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan	Satuan	Target Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Dan Kerangka Pendanaan 2023		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					K	Rp		
1	2	3	4	6	7	8	9	10
2.16.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	7	26.250.000	Diskominfo	kota Blitar
2.16.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	10.500.000	Diskominfo	kota Blitar
2.16.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	Jml pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah yang sesuai standar /Jml pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah x 100%		100	4.344.021.045	Diskominfo	kota Blitar
2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	13	4.335.936.150	Diskominfo	kota Blitar
2.16.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan /Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	4	8.084.895	Diskominfo	kota Blitar

Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan	Satuan	Target Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Dan Kerangka Pendanaan 2023		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					K	Rp		
1	2	3	4	6	7	8	9	10
2.16.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	Jml pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar /Jml pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah x 100%		100	1.347.521.805	Diskominfo	kota Blitar
2.16.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	68	26.569.300	Diskominfo	kota Blitar
2.16.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Orang	50	1.320.952.605	Diskominfo	kota Blitar
2.16.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	Jml administrasi umum perangkat daerah yang tersedia /Jml administrasi umum perangkat daerah yang harus tersedia x 100%		100	393.682.510	Diskominfo	kota Blitar
2.16.01.2.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/ Penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	17.839.500	Diskominfo	kota Blitar
2.16.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan pada tahun berjalan	Paket	3	11.000.000	Diskominfo	kota Blitar
2.16.01.2.06.03	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5	33.966.790	Diskominfo	kota Blitar

Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan	Satuan	Target Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Dan Kerangka Pendanaan 2023		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					K	Rp		
1	2	3	4	6	7	8	9	10
2.16.01.2.06.04	Penyediaan bahan Logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	36	83.391.220	Diskominfo	kota Blitar
2.16.01.2.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	14.542.500	Diskominfo	kota Blitar
2.16.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	24	10.237.500	Diskominfo	kota Blitar
2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	36	222.705.000	Diskominfo	kota Blitar
2.16.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standart	Jml penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia/Jml layanan penunjang urusan pemerintahan x 100%		100	429.040.500	Diskominfo	kota Blitar
2.16.01.2.08.02	Penyediaan jasa komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	36	429.040.500	Diskominfo	kota Blitar
2.16.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	13	232.050.000	Diskominfo	kota Blitar

Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan	Satuan	Target Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Dan Kerangka Pendanaan 2023		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					K	Rp		
1	2	3	4	6	7	8	9	10
2.16.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standart	Jml penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia/Jml layanan penunjang urusan pemerintahan x 100%		100	355.911.780	Diskominfo	kota Blitar
2.16.01.2.09.02	Penyediaan jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan , Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	8	127.682.940	Diskominfo	kota Blitar
2.16.01.2.09.06	Pemeliharaan peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	8	34.234.700	Diskominfo	kota Blitar
2.16.01.2.09.09	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	70.000.000	Diskominfo	kota Blitar
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	70.192.500	Diskominfo	kota Blitar
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah BMD penunjang urusan yang tersedia / jumlah BMD penunjang urusan sesuai kebutuhan x 100%	Persen	100	1.125.000.000	Diskominfo	kota Blitar

Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan	Satuan	Target Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Dan Kerangka Pendanaan 2023		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					K	Rp		
1	2	3	4	6	7	8	9	10
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	1.125.000.001	Diskominfo	kota Blitar

Tabel 6.3 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2024 – 2026

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan/ Definisi Operasional	Satuan	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
					2024		2025		2026					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp				K
1	2	3	4	6	9		10		11		12		13	14
	DISKOMINFOTIK													
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA												DISKOMINFOTIK	Kota Blitar
	Tujuan 1 : Meningkatnya Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	(Bobot x Domain Kebijakan SPBE) + (Bobot x Domain Tata Kelola SPBE) + (Bobot x Layanan SPBE)		3,2		3,25		3,45		3,45		DISKOMINFOTIK	Kota Blitar
	SASARAN 1: Meningkatnya layanan SPBE melalui kebijakan dan tata kelola TIK	Persentase layanan publik online dan terintegrasi	Jumlah Layanan publik online dan terintegrasi/ Jumlah layanan publik x 100 %		98		100		100		100		DISKOMINFOTIK	Kota Blitar
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase penerapan sistem elektronik dalam layanan publik	Rata rata persentase jaringan infrastruktur yang tersambung + persentase layanan spbe yang terintegrasi		92,89	8.288.199.022	95	8.759.134.892	100	9.290.512.776	100	41.610.571.857	DISKOMINFOTIK	Kota Blitar
2.16.03.2.01.	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Presentase penerapan domain go.id / sub domaian pada aplikasi administrasi pemerintahan dan layanan public sesuai aturan			100	6.656.682.688	100	6.992.015.933	100	7.344.365.750	100	27.330.598.438	DISKOMINFOTIK	Kota Blitar

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan/ Definisi Operasional	Satuan	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
					2024		2025		2026					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp				K
1	2	3	4	6	9		10		11		12		13	14
2.16.03.2.01.0001	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah	Domain	6	21.615.000	6	21.945.750	6	22.293.038	24	87.153.788	DISKOMINFOTIK	Kota Blitar
2.16.03.2.01.0002	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	2	64.982.196	2	79.080.416	2	75.478.457	7	279.979.429	DISKOMINFOTIK	Kota Blitar
2.16.03.2.01.0003	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Unit	20	6.600.085.492	20	6.930.089.767	20	7.276.594.255	63	26.778.275.436	DISKOMINFOTIK	Kota Blitar
2.16.03.2.02.	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah aplikasi pemerintahan dan layanan public yang tersedia/jumlah kebutuhan aplikasi pemerintahan dan layanan publik x 100%		96	1.631.516.334	98	1.767.118.959	100	1.946.147.026	100	7.066.061.471	DISKOMINFOTIK	Kota Blitar
2.16.03.2.02.0001	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E - Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	57.451.467	1	87.842.040	1	91.215.242	4	308.605.384	DISKOMINFOTIK	Kota Blitar

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan/ Definisi Operasional	Satuan	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
					2024		2025		2026					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp				K
1	2	3	4	6	9		10		11		12		13	14
2.16.03.2.02.0002	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Dokumen	1	2.143.260	1	81.000.423	1	2.362.944	4	162.547.827	DISKOMINFOTIK	Kota Blitar
2.16.03.2.02.0003	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	Unit	1	58.205.000	1	67.000.000	1	193.000.000	4	499.415.000	DISKOMINFOTIK	Kota Blitar
2.16.03.2.02.0004	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Dokumen	1	784.000.000	1	824.000.000	1	868.000.000	4	3.224.000.000	DISKOMINFOTIK	Kota Blitar
2.16.03.2.02.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Dokumen	3	150.000.000	3	50.000.000	3	205.000.000	11	675.063.600	DISKOMINFOTIK	Kota Blitar
2.16.03.2.02.0006	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Perangkat	1	211.000.000	3	22.050.000	3	178152500	8	481.202.500	DISKOMINFOTIK	Kota Blitar

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan/ Definisi Operasional	Satuan	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2024		2025		2026					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	6	9		10		11		12		13	14
2.16.03.2.02.0007	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	Unit	2	604.753.218	2	635.700.404	2	716.740.974	8	2.640.055.280	DISKOMINFOTIK	Kota Blitar
2.16.03.2.02.0008	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Layanan	2	100.000.000	2	25.000.000	2	65.000.000	7	202.000.000	DISKOMINFOTIK	Kota Blitar
2.16.03.2.02.0009	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	Dokumen	2	857.500.000	2	31.537.000	2	87.364.375	7	99.890.137,50	DISKOMINFOTIK	Kota Blitar
2.16.03.2.02.0010	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Dokumen	1	244.176.727	1	308.085.563	1	268.486.842	4	1.090.488.872	DISKOMINFOTIK	Kota Blitar
2.16.03.2.02.0011	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Dokumen	1	1.800.000	1	1.800.000	1	1.800.000	4	7.117.062	DISKOMINFOTIK	Kota Blitar

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan/ Definisi Operasional	Satuan	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2024		2025		2026					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	6	9		10		11		12		13	14
	SASARAN 2: Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	Nilai Hasil Monev PPID	Hasil Penilaian Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia No 1 Tahun 2022 Tentang Monitoring Dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik		91		96		100		100		DISKOMINFOTIK	Kota Blitar
		Presentase Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat	Jumlah pengaduan yang di tindaklanjuti di SP4N LAPOR / jumlah pengaduan yang masuk di SP4N LAPOR * 100%		100%		100%		100%		100%			
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang Ditetapkan Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah daerah		90 80	2827706438	95 90	2969091760	100 100	3093906654	100 100	14148571699	DISKOMINFOTIK	Kota Blitar
2.16.02.2.01.	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik/ jumlah masyarakat x 100%		57	2827706438	68,5	2969091760	89	3093906654	89	11583758603	DISKOMINFOTIK	Kota Blitar

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan/ Definisi Operasional	Satuan	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
					2024		2025		2026					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp				K
1	2	3	4	6	9		10		11		12		13	14
2.16.02.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Dokumen	2	30.802.637	2	32.342.769	2	33.959.908	8	126.441.159	DISKOMINFOTIK	Kota Blitar
2.16.02.2.01.0002	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Dokumen	4	18.081.956	2	18.697.739	2	19.632.625	12	73.633.230	DISKOMINFOTIK	Kota Blitar
2.16.02.2.01.0003	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Dokumen	12	6.887.318	12	7.231.683	12	7.593.268	48	28.271.619	DISKOMINFOTIK	Kota Blitar
2.16.02.2.01.0004	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Dokumen	520	191.963.441	520	201.561.613	530	210.000.000	2080	786.347.379	DISKOMINFOTIK	Kota Blitar

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan/ Definisi Operasional	Satuan	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
					2024		2025		2026					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp				K
1	2	3	4	6	9		10		11		12		13	14
2.16.02.2.01.0005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Dokumen	11	877.765.187	6	921.653.447	6	967.736.119	34	3.603.121.598	DISKOMINFOTIK	Kota Blitar
2.16.02.2.01.0006	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Dokumen	12	671.776.072	6	705.364.875	6	705.364.875	28	2.722.292.557	DISKOMINFOTIK	Kota Blitar
2.16.02.2.01.0007	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	Layanan	1100	846.495.086	1150	888.819.840	1300	933.260.832	5650	3.474.761.554	DISKOMINFOTIK	Kota Blitar
2.16.02.2.01.0008	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	Dokumen	1	144.011.306	5	151.211.872	5	158.772.465	12	584.291.587	DISKOMINFOTIK	Kota Blitar

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan/ Definisi Operasional	Satuan	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
					2024		2025		2026					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp				K
1	2	3	4	6	9		10		11		12		13	14
2.16.02.2.01.0009	Manajemen Komunikasi Krisis	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Manajemen Komunikasi Krisis	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Manajemen Komunikasi Krisis	Dokumen	1	12.892.966	1	13.537.614	1	14.214.495	4	52.924.090	DISKOMINFOTIK	Kota Blitar
2.16.02.2.01.0010	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	Orang	30	6.214.021	50	6.524.722	50	6.850.958	160	25.507.816	DISKOMINFOTIK	Kota Blitar
2.16.02.2.01.0012	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	Dokumen	80	20.200.667	80	21.210.700	80	22.271.235	320	82.921.332	DISKOMINFOTIK	Kota Blitar
	SASARAN 3: Meningkatnya Penyelenggaraan statistik sektoral	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan dan evaluasi pembangunan	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik utk perencanaan dan evaluasi pembangunan/ jumlah OPD X 100%		98		99		100		100			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan/ Definisi Operasional	Satuan	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
					2024		2025		2026					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp				K
1	2	3	4	6	9		10		11		12		13	14
		Indeks Pembangunan Statistik	$k \sum \text{ bobot domain } k \times \text{ nilai domain } k$ $k=1$		2,7		2,9		3,1		3,1			
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Data statistik yang terpublikasi menggunakan sistem elektronik		Persen	96,71	534.211.717	98,31	563.422.303	100	592.843.418	100	2.623.032.584	DISKOMINFOTIK	Kota Blitar
2.20.02.2.01.	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Presentase survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	Jumlah usulan survey statistic sektoral yang mendapatkan rekomendasi dari BPS/jumlah usulan survey statistic sektoral x 100%	Persen	100	450.000.000	100	475.000.000	100	500.000.000	100	1.850.000.000	DISKOMINFOTIK	Kota Blitar
2.20.02.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Dokumen	3	450.000.000	3	475.000.000	3	500.000.000	14	1.850.000.000	DISKOMINFOTIK	Kota Blitar
2.20.02.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Orang	10	20.541.460	10	21.568.533	10	22.646.960	40	84320249	DISKOMINFOTIK	Kota Blitar

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan/ Definisi Operasional	Satuan	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2024		2025		2026					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	6	9		10		11		12		13	14
2.20.02.2.01.0003	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	Dokumen	4	27.562.500	30	28.940.625	30	30.387.656	72	113140781	DISKOMINFOTIK	Kota Blitar
2.20.02.2.01.0004	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	Orang	4	3.652.020	4	3.806.271	4	3.996.585	20	14907276	DISKOMINFOTIK	Kota Blitar
2.20.02.2.01.0005	Pengembangan Infrastruktur	Jumlah Infrastruktur Statistik	Jumlah Infrastruktur Statistik	Unit	1	27.652.500	1	28.940.625	1	30.387.656	4	113.230.781	DISKOMINFOTIK	Kota Blitar
2.20.02.2.01.0006	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun	Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun	Dokumen	1	4.920.237	1	5.166.249	1	5.424.561	4	20.196.987	DISKOMINFOTIK	Kota Blitar
2.21.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN												DISKOMINFOTIK	Kota Blitar
	SASARAN 4: Meningkatnya Keamanan Informasi	Indeks KAMI	Jumlah nilai per area keamanan informasi/Jumlah area penilaian x 100 %		54,26		62,02		69,77		69,77		DISKOMINFOTIK	Kota Blitar
2.21.02..	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase implementasi Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			64,26	395.042.927	62,02	414.795.073	69,77	435.534.827	69,77	1.979.919.556	DISKOMINFOTIK	Kota Blitar

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan/ Definisi Operasional	Satuan	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2024		2025		2026					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	6	9		10		11		12		13	14
2.21.02.2.01.	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kepatuhan OPD terhadap penerapan persandian untuk pengamanan informasi pemerintsh daerah kab/kota	Jumlah OPD yang memanfaatkan sertifikat elektronik pada persuratan / sitem elektronik dibandingkan dengan jumlah seluruh OPD		54,26	253.817.043	62,02	266.507.895	60,77	279.833.290	60,77	1041888745	DISKOMINFOTIK	Kota Blitar
2.21.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Dokumen	1	136.460.438	1	143.283.460	1	150.447.633	4	560.153.853	DISKOMINFOTIK	Kota Blitar
2.21.02.2.01.0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	4	56.715.709	4	59.551.495	4	62.529.069	18	232.811.234	DISKOMINFOTIK	Kota Blitar
2.21.02.2.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Laporan	2	39.450.030	2	41.422.531	2	43.493.658	9	161.937.676	DISKOMINFOTIK	Kota Blitar

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan/ Definisi Operasional	Satuan	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
					2024		2025		2026					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp				K
1	2	3	4	6	9		10		11		12		13	14
2.21.02.2.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Perangkat	20	21.190.866	21	22.250.409	21	23.362.930	82	86.985.982	DISKOMINFOTIK	Kota Blitar
2.21.02.2.02.	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penerapan pola hubungan komunikasi sandi	Persentase penerapan pola hubungan komunikasi sandi yang dilaksanakan pada tahun berjalan		50	141.225.884	75	148.287.178	100	155.701.537	100	579.715.441	DISKOMINFOTIK	Kota Blitar
2.21.02.2.02.0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	Perangkat	40	141.225.884	40	148.287.178	40	148.287.178	140	572.301.082	DISKOMINFOTIK	Kota Blitar
	TUJUAN 2 : Meningkatkan Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat		A 86,25		A 87,5		A 88,75		A 88,75		DISKOMINFOTIK	Kota Blitar
	SASARAN 5 : Meningkatkan kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat		A 86,25		A 87,5		A 88,75		A 88,75		DISKOMINFOTIK	Kota Blitar
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Jumlah dokumen IKM yang disusun / dokumen x 100%		Baik (79-84)	5.620.013.546,42	Baik (79-84)	5.826.617.345,25	Baik (79-84)	6.058.291.817,33	Baik (79-84)	23.134.374.247,01	DISKOMINFOTIK	Kota Blitar

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan/ Definisi Operasional	Satuan	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2024		2025		2026					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	6	9		10		11		12		13	14
2.16.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jml dok perencanaan dan pelaporan tersusun tepat waktu /Jml dok perencanaan dan pelaporan yang harus tersusun x 100%		100	45.939.301	100	48.236.266	100	50.648.079	100	188.575.361	DISKOMINFOTIK	Kota Blitar
2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	11	18.376.801	11	19.295.641	11	20.260.423	44	75434580	DISKOMINFOTIK	Kota Blitar
2.16.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	7	27.562.500	7	28.940.625	7	30.387.656	28	113.140.781	DISKOMINFOTIK	Kota Blitar
2.16.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	1.100.000	1	11.500.000	1	11.500.000	4	34.600.000	DISKOMINFOTIK	Kota Blitar
2.16.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jml pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah yang sesuai standar /Jml pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah x 100%		100	4.561.222.097	100	4.789.283.202	100	5.028.747.362	100	18.723.273.706	DISKOMINFOTIK	Kota Blitar

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan/ Definisi Operasional	Satuan	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2024		2025		2026					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	6	9		10		11		12		13	14
2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	13	4.552.732.958	13	4.780.369.605	13	5.019.388.086	52	18.688.426.799	DISKOMINFOTIK	Kota Blitar
2.16.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	4	8.489.140	4	8.913.597	4	9.359.277	16	34.846.909	DISKOMINFOTIK	Kota Blitar
2.16.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jml pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar /Jml pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah x 100%		100	1.414.897.895	100	1.485.642.790	100	1.559.924.930	100	5.807.987.420	DISKOMINFOTIK	Kota Blitar
2.16.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	65	27.897.660	65	29.292.543	51	30.757.170	249	114.516.673	DISKOMINFOTIK	Kota Blitar
2.16.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Orang	100	1.387.000.235	100	1.456.350.247	100	1.529.167.759	350	5.693.470.846	DISKOMINFOTIK	Kota Blitar

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan/ Definisi Operasional	Satuan	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2024		2025		2026					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	6	9		10		11		12		13	14
2.16.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jml administrasi umum perangkat daerah yang tersedia /Jml administrasi umum perangkat daerah yang harus tersedia x 100%		100	413.366.636	100	434.034.967	100	455.736.716	100	1.696.820.829	DISKOMINFOTIK	Kota Blitar
2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	18.731.475	4	19.668.049	4	20.651.451	16	76.890.475	DISKOMINFOTIK	Kota Blitar
2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan pada tahun berjalan	Paket	3	11.000.000	3	11.000.000	3	11.000.000	12	44.000.000	DISKOMINFOTIK	Kota Blitar
2.16.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5	35.665.130	5	37.448.386	5	39.320.806	20	146.401.112	DISKOMINFOTIK	Kota Blitar
2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	36	88.110.781	36	93.066.320	36	98.269.636	1140	362.837.957	DISKOMINFOTIK	Kota Blitar
2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	15.269.625	1	16.033.106	1	16.834.762	4	62.679.993	DISKOMINFOTIK	Kota Blitar
2.16.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	24	10.749.375	24	11.286.844	24	11.851.186	96	44.124.905	DISKOMINFOTIK	Kota Blitar

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan/ Definisi Operasional	Satuan	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2024		2025		2026					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	6	9		10		11		12		13	14
2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	36	233.840.250	36	245.532.263	37	257.808.876	145	959.886.389	DISKOMINFOTIK	Kota Blitar
2.16.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jml penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia/Jml layanan penunjang urusan pemerintahan x 100%		100	450.492.525	100	473.017.151	100	496.668.009	100	1.849.218.185	DISKOMINFOTIK	Kota Blitar
2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	36	450.492.525	36	473.017.151	36	496.668.009	144	1.849.218.185	DISKOMINFOTIK	Kota Blitar
2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	13	250.000.000	13	250.000.000	13	250.000.000	52	982.050.000	DISKOMINFOTIK	Kota Blitar
2.16.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jml penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia/Jml layanan penunjang urusan pemerintahan x 100%		100	373.707.369	100	392.392.737	100	412.012.374	100	1.534.024.260	DISKOMINFOTIK	Kota Blitar
2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	8	134.067.087	8	140.770.441	8	147.808.963	32	550.329.431	DISKOMINFOTIK	Kota Blitar

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan/ Definisi Operasional	Satuan	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2024		2025		2026					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	6	9		10		11		12		13	14
2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	9	40.000.000	8	40.000.000	9	40.000.000	34	154.234.700	DISKOMINFOTIK	Kota Blitar
2.16.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	80.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	4	310.000.000	DISKOMINFOTIK	Kota Blitar
2.16.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	73.702.125	2	77.387.231	2	81.256.593	8	238.985.226	DISKOMINFOTIK	Kota Blitar
2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah BMD penunjang urusan yang tersedia / jumlah BMD penunjang urusan sesuai kebutuhan x 100%	Persen	100	1.181.250.000	100	550.000.000	100	577.500.000	100	3.433.750.000	DISKOMINFOTIK	Kota Blitar
2.16.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	3	80.000.000	3	80.000.000	3	80.000.000	9	80.000.000	DISKOMINFOTIK	Kota Blitar

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Formulasi Perhitungan/ Definisi Operasional	Satuan	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
					2024		2025		2026					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp				K
1	2	3	4	6	9		10		11		12		13	14
2.16.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	6	1.181.250.000	6	550.000.000	6	577.500.000	24	1.708.750.000	DISKOMINFOTIK	Kota Blitar

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN KOMUNIKASI,
INFORMATIKA DAN STATISTIK

Capaian kinerja organisasi merupakan capaian sasaran strategis yang diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi pada indikator kinerja sasaran strategis tersebut. Kemudian atas hasil dari pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan capaian sasaran strategis serta alternatif solusi apa saja yang perlu dilakukan, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, dan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Pada tabel di bawah ini disajikan indikator kinerja yang ditetapkan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Blitar di mana secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Blitar Tahun 2021-2026.

TABEL 7.1
INDIKATOR KINERJA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA BLITAR
TAHUN 2022 – 2023 yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	SASARAN RPJMD	TUJUAN /SASARAN	Indikator Tujuan / Sasaran	Target dan Realisasi[w1] Kinerja Tujuan / Sasaran	
				2022	2023
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	TUJUAN : Meningkatnya Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,31	2,63
2		SASARAN 1: Meningkatnya layanan SPBE melalui kebijakan dan tata kelola TIK	Persentase layanan publik online dan terintegrasi	89	94
3		SASARAN 2: Meningkatnya Sistem Keterbukaan Informasi Publik	Nilai Hasil Monev PPID	81	86
4		SASARAN 3: Meningkatnya Permanfaatan Data Statistik Daerah	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan dan evaluasi pembangunan	96	97

NO	SASARAN RPJMD	TUJUAN /SASARAN	Indikator Tujuan / Sasaran	Target dan Realisasi ^[w/1] Kinerja Tujuan / Sasaran	
				2022	2023
1	2	3	4	5	6
5		SASARAN 4: Meningkatnya Keamanan Informasi	Indeks KAMI	38,76	46,51
6	Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	TUJUAN : Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A 84,28	A 85
7		SASARAN : Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A 84,28	A 85

7.2 Indikator Kinerja Perangkat
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA BLITAR 2024-
2026 yang Mengacu pada

NO	SASARAN RPJMD	TUJUAN /SASARAN	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran			
				2024	2025	2026	Akhir Periode Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	TUJUAN : Meningkatnya Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,20	3,25	3,45	3,45
2		SASARAN 1: Meningkatnya layanan SPBE melalui kebijakan dan tata kelola TIK	Persentase layanan publik online dan terintegrasi	98%	100 %	100 %	100%
3		SASARAN 2: Meningkatnya Sistem Keterbukaan Informasi Publik	Nilai Hasil Monev PPID	91	96	100	100
			Presentase Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat	100 %	100 %	100 %	100 %

NO	SASARAN RPJMD	TUJUAN /SASARAN	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran			
				2024	2025	2026	Akhir Periode Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8
4		SASARAN 3: Meningkatnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan dan evaluasi pembangunan	98%	99%	100 %	100 %
			Indeks Pembangunan Statistik	2.7	2.9	3.1	3.1
5		SASARAN 4: Meningkatnya Keamanan Informasi	Indeks KAMI	54,26	62,02	69,77	69,77
6	Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	TUJUAN :		A	A	A	A
		Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	86,25	87,5	88,75	88,75
7		SASARAN :		A	A	A	A
		Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	86,25	87,5	88,75	88,75

TABEL 7.3 Indikator Kinerja Utama Tahun 2022-2026

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal 2020	Target Capaian					Kondisi Akhir
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	Persentase layanan publik online dan terintegrasi	Angka	81	89	94	98	100	100	100
2	Nilai Hasil Monev PPID	Angka	71	81	86	91	96	100	100
3	Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam Menyusun perencanaan pembangunan dan evaluasi pembangunan	Persen	94.83	96	97	98	99	100	100
4	Indeks KAMI	Indeks	20.31	38.76	46.51	54.26	62.02	69.77	69.77

7^[w12].4 Indikator Kinerja Kunci (IKK) DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
STATISTIK KOTA BLITAR

NO	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun Ke					Kondisi Akhir
				2022	2023	2024	2025	2026	
Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika									
1	Presentase PD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Persen	100	100	100	100	100	100	100
2	Presentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Persen	81	89	94	98	100	100	100
3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah Kota Blitar	Persen	22,45	34	45,5	57	68,5	80	80
Urusan Pemerintahan Bidang Statistik									
4	Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Persen	94,83	100	100	100	100	100	100
5	Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Persen	94,83	100	100	100	100	100	100
Urusan Pemerintahahan Bidang Persandian									
6	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Persen	20,6	38,76	46,51	54,26	62,02	69,77	69,77

BAB VIII PENUTUP

Rencana strategis Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kota Blitar Tahun 2021-2026 ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar. Rencana strategis perubahan Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik disusun dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan daerah serta untuk menjadi arah dan pedoman pelaksanaan penyelenggaraan program/kegiatan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik.

Dalam hal ini ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan Rencana Strategis Perubahan Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik tahun 2021 -2026,
2. Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik dijadikan acuan dan dijabarkan ke dalam rencana kerja tahunan mulai 2021 sampai dengan 2026 unit kerja di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik.
3. Dalam rangka menjaga efektifitas pelaksanaan Rencana Strategis Perubahan Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik, masing-masing unit kerja di lingkungan Dinas berkewajiban melaksanakan pemantauan dan evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan Rencana Strategis dalam keterkaitannya dengan rencana kerja Dinas tahun 2021-2026. Apabila di kemudian hari terdapat peraturan perundangan tentang perangkat daerah dan struktur organisasi dan tata kerja terhadap Rencana Strategis dengan pengacu pada peraturan perundangan yang baru.
4. Perubahan Rencana Strategis perangkat daerah dilakukan sebagai tindaklanjut pemutakhiran Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Selanjutnya dengan konsistensi terhadap tujuan dan sasaran pada rencana strategis Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik tahun 2021-2026 dapat mendukung pelaksanaan capaian kinerja pemerintah daerah khususnya sebagaimana tertuang dalam misi 5 “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi ”.